



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

**Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah**



LAPORAN KINERJA

LPMP

PROVINSI SUMATERA UTARA

2021



LAPORAN KINERJA



LPMP **PROVINSI** SUMATERA UTARA

SIAP BERSIH MELAYANI MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

2021





SAMBUTAN KEPALA

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga kami dapat menuntaskan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, melewati tahun 2021 yang cukup menantang dan menyelesaikan Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Pada tahun 2021, Pandemi Covid-19 masih melanda dunia khususnya Indonesia, dimana terjadinya kenaikan kasus terinfeksi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga varian baru Omicron, namun segala sesuatunya itu tidak menjadi hambatan berarti dalam menuntaskan tugas lembaga.



SAMBUTAN dan *PENGANTAR*

Dengan segala upaya, berbekal penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 secara ketat, pengalaman tahun sebelumnya, komunikasi dan koordinasi yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan di Provinsi Sumatera Utara, hingga akhirnya segala tugas-tugas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kepada LPMP Provinsi Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, terutama yang terkait dengan Program Merdeka Belajar.

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban lembaga dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun berjalan serta atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang pada Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif tentang kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara serta dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban atas kinerja dalam menjalankan tata kelola kelembagaan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2021.



Kepala,

Afrizal Sihotang, S.T., M.Si
NIP 19741211 200212 1 001

Kata Pengantar

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Ajizah Siregar, M.Pd.

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. terselesaikannya Laporan kinerja ini tidak terlepas pula berkat kerjasama tim yang kompak sepanjang tahun 2021.

Laporan Kinerja merupakan salah satu kewajiban kami dalam melaksanakan salah satu siklus pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).





SAMBUTAN *dan PENGANTAR*

Laporan Kinerja menggambarkan keberhasilan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tidak terlepas dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta berkaitan erat dengan tujuh fungsi LPMP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

LPMP Provinsi Sumatera Utara sepanjang tahun 2021 telah berhasil dalam menjalankan tugas dan fungsinya, merealisasikan target sesuai dengan perjanjian kinerjanya, terutama pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Program Merdeka Belajar. Pada tahun 2021, kami juga turut ambil bagian dalam upaya meraih predikat Zona Integritas-Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK), namun kami belum mendapatkan predikat tersebut. Belum berhasilnya meraih predikat ZI-WBK semakin meningkatkan semangat pimpinan dan para pegawai untuk meningkatkan kinerja dan berinovasi.

Semoga Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan khususnya bidang pendidikan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan kinerja berikut masih terdapat kekurangan, untuk itu segala saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya.

*Terima **kasih.***

KOORDINATOR FUNGSI

LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. Syahdian, M.Si.

Koordinator
Fungsi Fasilitas Peningkatan Mutu
Pendidikan dan Kerjasama Peningkatan
Mutu Pendidikan



Dra. Sri Wandayani Harahap, M.Pd.

Koordinator
Fungsi Pemetaan Mutu & Supervisi

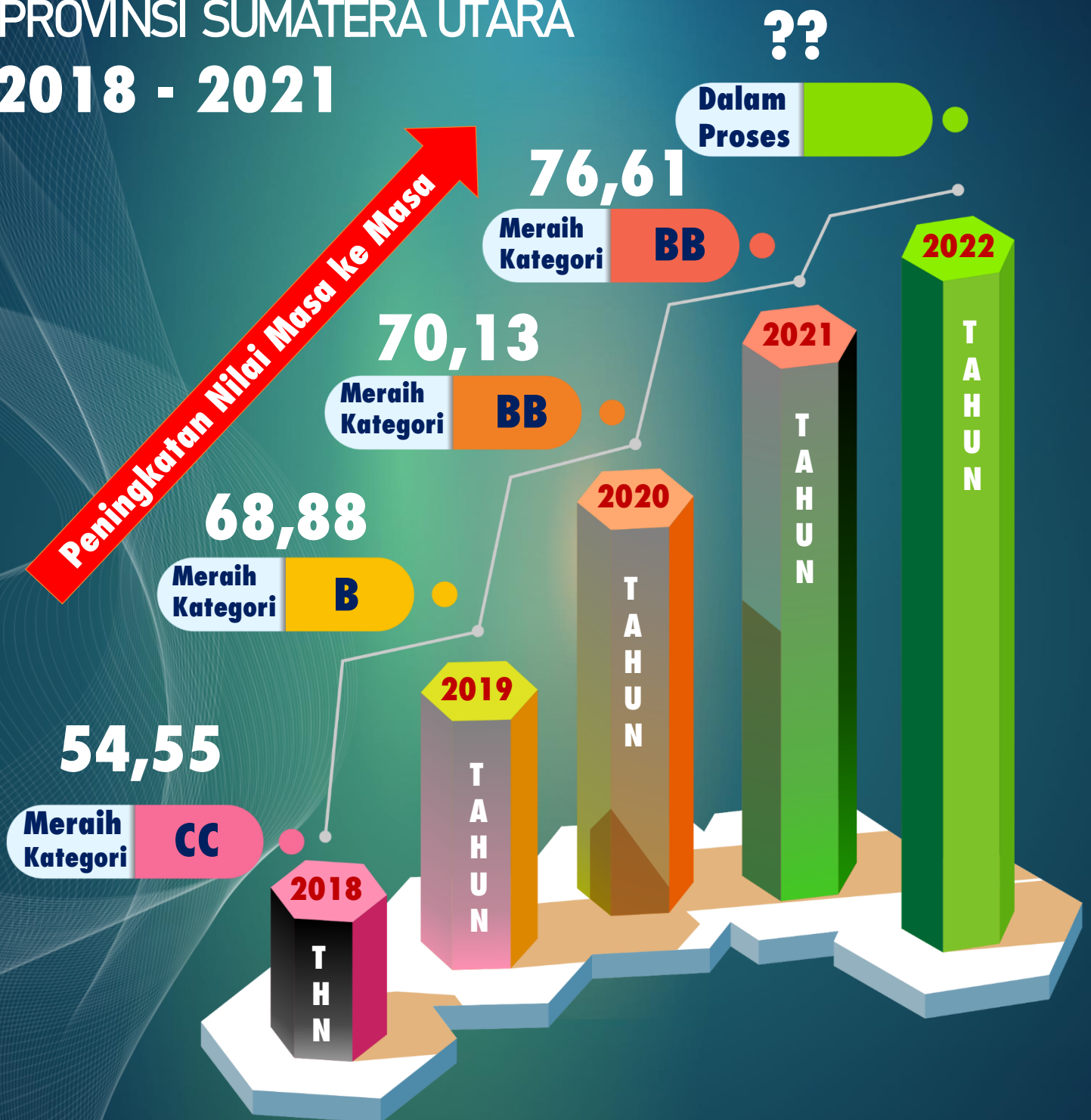
Dedy Iskandar, S.T.

Koordinator
Fungsi Sistem Informasi



NILAI SAKIP LPMP

PROVINSI SUMATERA UTARA
2018 - 2021



DAFTAR ISI

SAMBUTAN KEPALA	ii
KATA PENGANTAR KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	iv
NILAI SAKIP LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
IKHTISAR EKSEKUTIF	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	3
D. Isu-isu Strategis/Permasalahan Utama.....	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

7

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara	15
B. Realisasi Anggaran.....	29
C. Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan TA 2021	31

BAB IV PENUTUP

46

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tahapan Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024.....	8
Tabel 2.2.	Target Kinerja Yang Terdapat Pada Perjanjian Kinerja Final Per November 2021.....	9
Tabel 2.3.	Alokasi Anggaran Berdasarkan <i>Output</i> Kegiatan.....	9
Tabel 2.4.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal.....	11
Tabel 2.5.	Rencana Aksi Rincian <i>Output</i>	12
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1	15
Tabel 3.2.	Persentase Satuan Pendidikan di Sumatera Utara dengan Nilai Rapor Mutu $\geq 6,00$	16
Tabel 3.3.	Persentase Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota dengan Nilai Rapor Mutu $\geq 6,00$ dibandingkan dengan target IKK 1.1.....	17
Tabel 3.4.	Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.1	18
Tabel 3.5.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2	19
Tabel 3.6.	Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Literasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	20
Tabel 3.7.	Persentase Kesenjangan Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Literasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	20
Tabel 3.8.	Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Numerasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	21
Tabel 3.9.	Persentase Kesenjangan Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Numerasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	21
Tabel 3.10.	Persentase Kesenjangan Hasil Survei Karakter di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	22

daftar tabel

Tabel 3.11.	Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan Survei Karakter.....	22
Tabel 3.12.	Hambatan dan Solusi Dalam Merealisasikan Target IKK 1.2.....	23
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.3	23
Tabel 3.14.	Nilai Rapor Dapodik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.....	24
Tabel 3.15.	Hambatan dan Solusi Dalam Merealisasikan Target IKK 1.3.....	25
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1.....	26
Tabel 3.17.	Capaian Kinerja Anggaran.....	28
Tabel 3.18.	Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran Tahun 2021..	30
Tabel 3.19	Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2021.....	30
Tabel 3.20	Realisasi Anggaran Berdasarkan <i>Output</i>	31
Tabel 3.21	Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD.....	35
Tabel 3.22	Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD.....	36
Tabel 3.23	Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMP.....	37
Tabel 3.24	Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMA.....	38
Tabel 3.25	Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SLB.....	39
Tabel 3.26	Jumlah Pelaksana PSP Provinsi Sumatera Utara Angkatan II.....	41
Tabel 4.1	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Sejarah LPMP.....	1
Gambar 1.2.	SDM LPMP Provinsi Sumatera Utara	2
Gambar 1.3.	Struktur Organisasi LPMP.....	5
Gambar 1.4.	Permasalahan/Isu Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara.....	6
Gambar 3.1.	Tangkapan Layar SPASIKITA.....	29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Grafik Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dapat Diolah Data Mutunya.....	16
Grafik 3.2.	Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara.....	26
Grafik 3.3.	Capaian Peringkat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara.....	26
Grafik 3.4.	Capaian Kinerja Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	29
Grafik 3.5.	Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2021.....	29
Grafik 3.6.	Persentase Kinerja Anggaran Berdasarkan Realisasi Jenis Belanja.....	30
Grafik 3.7.	Persentase Dinas Pendidikan Yang Menerbitkan SK Pelaksana AN.....	43
Grafik 3.8.	Status Asesmen Nasional Satuan Pendidikan Pelaksana.....	44
Grafik 3.9.	Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional di Provinsi Sumatera Utara.....	44

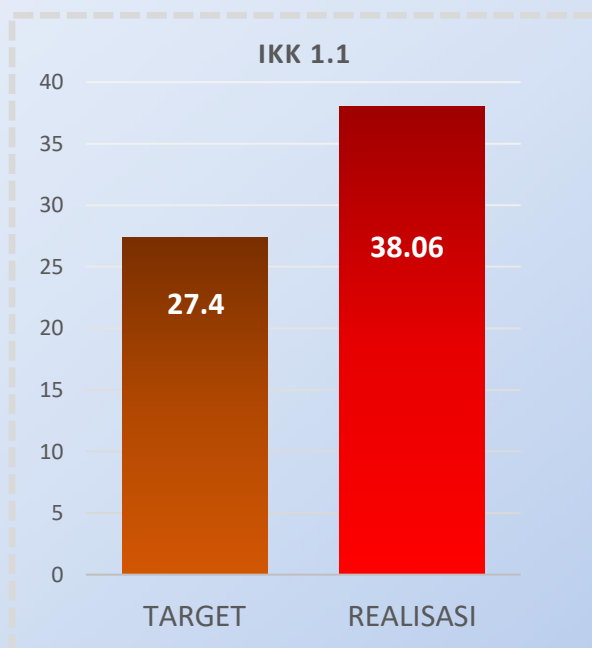
Ikhtisar Eksekutif

LPMP Provinsi Sumatera Utara merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi Sumatera Utara.

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 menyajikan informasi tingkat pencapaian kinerja pada tahun 2021 yang terdiri dari 2 (dua) sasaran Kegiatan yaitu “Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Jenjang Pendidikan” dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan” dan “Terwujudnya Tata Kelola LPMP Provinsi Sumatera Utara yang baik” dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen. Target kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat terpenuhi dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebagai berikut :

IKK 1.1. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (*scorecard*) minimal 75.



Menggunakan pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari laman PMP tahun 2020.

Ditetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,00.

Realisasi IKK 1.1 adalah 38,06% dari target sebesar 27,4% sehingga capaian kinerja = 138,91%.

IKK 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk.



Menggunakan data hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara.

Persentase kesenjangan hasil AN Literasi = 6,16% , AN Numerasi = 6,83% dan Survei Karakter = 0,2% sehingga nilai rata-rata = 4,4%

Realisasi IKK 1.2 adalah sebesar 4,4% dari target sebesar 5% sehingga capaian kinerja = 113,64%.

IKK 1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan



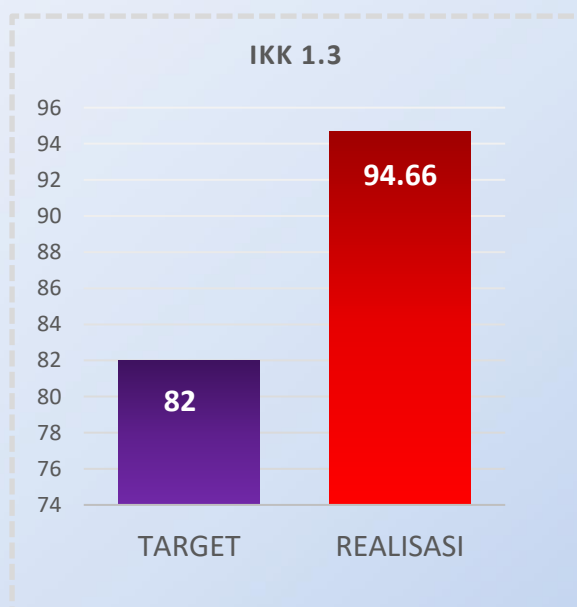
Menggunakan data rapor dapodik *online*. Sebanyak 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai Rapor Dapodik di atas 95%, dengan demikian realisasi IKK 1.3 = 100%.

Realisasi IKK 1.3 = 100% dibandingkan dengan target sebesar 95,2% maka Capaian kinerja IKK 1.3 adalah sebesar 105,04%.

IKK 2.1. Predikat SAKIP

Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021	
Target	BB
Realisasi	BB
Dengan Interpretasi	Sangat Baik, Akuntabel, Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

IKK. 2.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

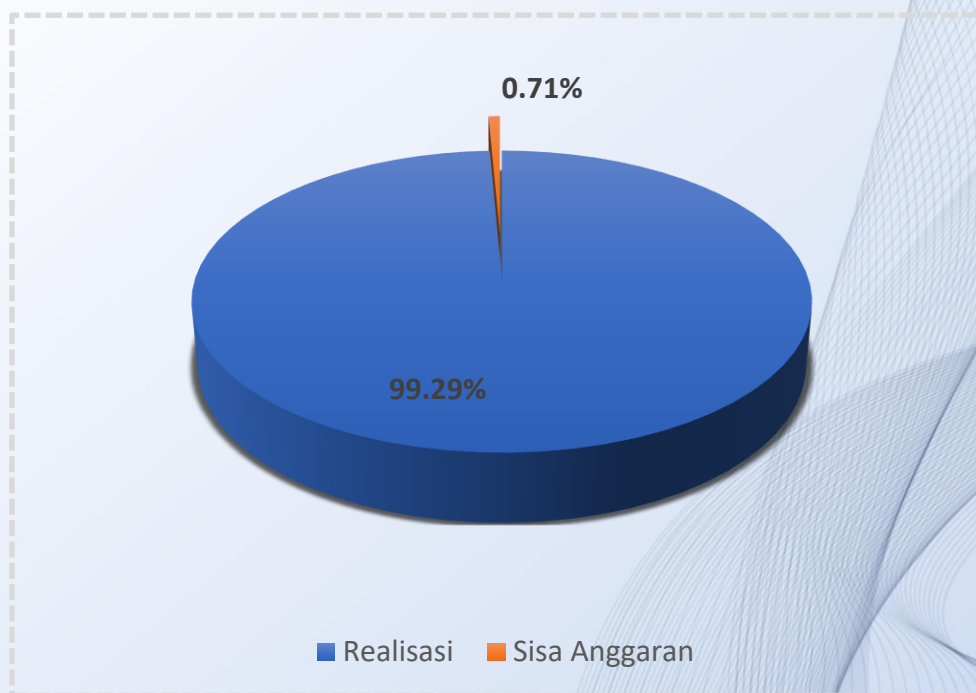


Nilai EKA = 95,96 dan nilai IKPA = 92,71, sehingga Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 = 94,66

Target yang tertera di Perjanjian Kinerja adalah 82.

Dengan demikian capaian kinerja adalah sebesar 115,44%.

Realisasi Anggaran



Grafik Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2021

Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 29.510.748.000	Rp 29.302.366.289	99,29%

Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Kinerja :

HAMBATAN	SOLUSI
Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah untuk pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.	Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.
Sinergi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah belum optimal.	Menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah
Masih banyak Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memahami maksud dan tujuan diadakannya Asesmen Nasional.	Melaksanakan pendampingan, <i>workshop</i> dan monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan Asesmen Nasional.
Masih terbatasnya kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami teknik Literasi dan Numerasi.	Melakukan pendampingan dan supervisi ke satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.
Masih banyak infrastruktur satuan pendidikan yang belum memadai melaksanakan Asesmen Nasional.	Mendorong pemerintah daerah untuk pemenuhan infrastruktur satuan pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional.
Masih banyak satuan pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional belum sesuai POS.	Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan terkait persiapan Asesmen Nasional sampai kepada pelaksanaan Asesmen Nasional dan kepatuhan terhadap POS.
Belum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.	Perlu regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.



BAB

1



PENDAHULUAN



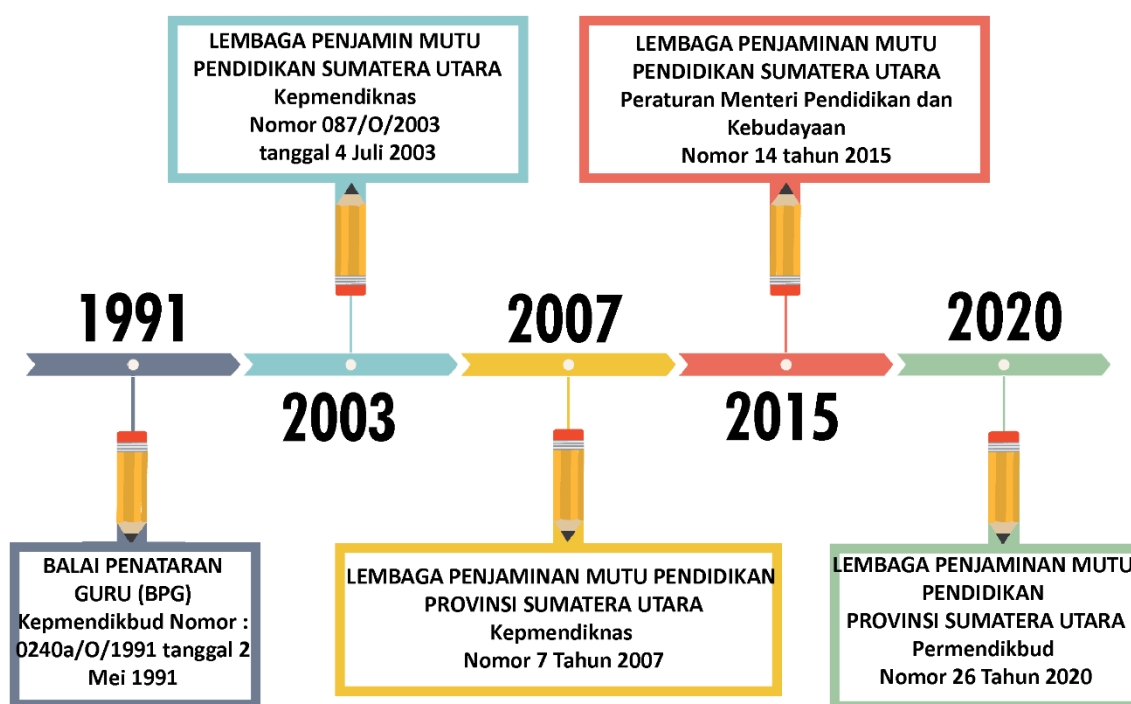
BAB - I

PENDAHULUAN



A. GAMBARAN UMUM

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara pada awalnya bernama Balai Penataran Guru (BPG) Sumatera Utara. Berikut perkembangan LPMP Provinsi Sumatera Utara dari masa ke masa.

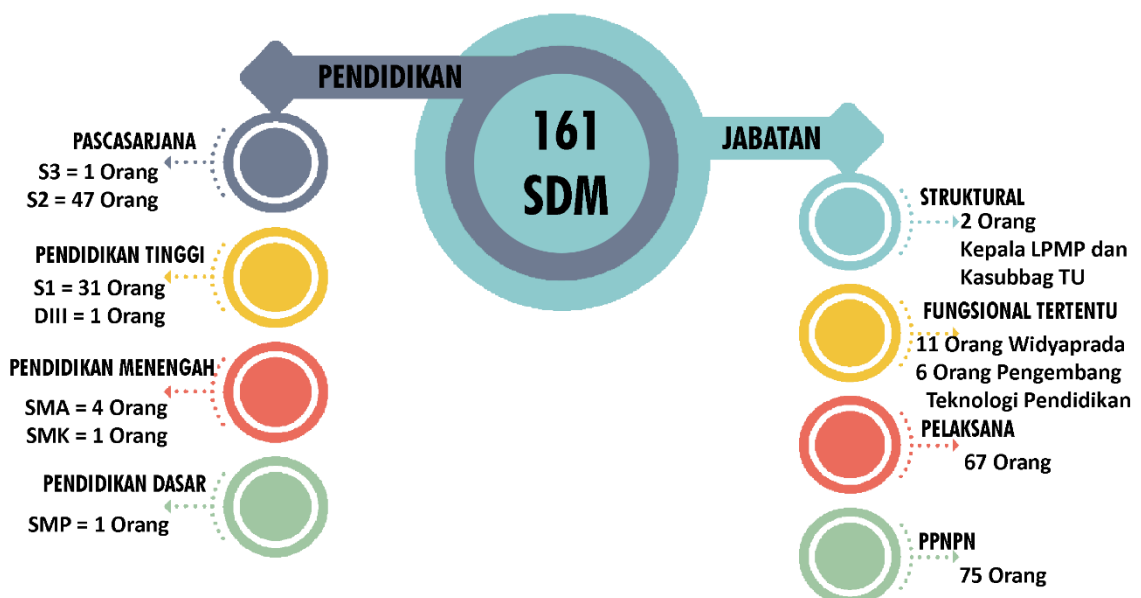


Gambar 1.1. Sejarah LPMP

Saat ini, LPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen) berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020. LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan

pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. LPMP Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Unit Eselon 1 yang dipimpin oleh Direktur Jendral PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Wilayah kerja LPMP Provinsi Sumatera Utara meliputi 33 Kabupaten/ Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan di provinsi, LPMP Provinsi Sumatera Utara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memadai hingga awal tahun 2022, jumlah PNS sebanyak 86 orang dan PPNPN sebanyak 75 orang. Seluruh SDM di LPMP Provinsi Sumatera Utara telah dipetakan berdasarkan kompetensi dan jabatannya masing-masing.



Gambar 1.2. SDM LPMP Provinsi Sumatera Utara

Kebijakan pengelolaan SDM dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan ketersediaan SDM yang berintegritas, profesional, dan kompeten sesuai bidang tugas sehingga mampu mendukung pencapaian tugas dan fungsi LPMP Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan ASN diprioritaskan bagi pengembangan dan peningkatan kompetensi ASN agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang ada. Sinergi antar bidang tugas diharapkan dapat memberikan layanan penjaminan mutu pendidikan yang berkualitas bagi seluruh pengguna dan penerima layanan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Rencana Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 - 2024;
7. DIPA Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021.

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020, LPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di tingkat provinsi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS LPMP

Melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi

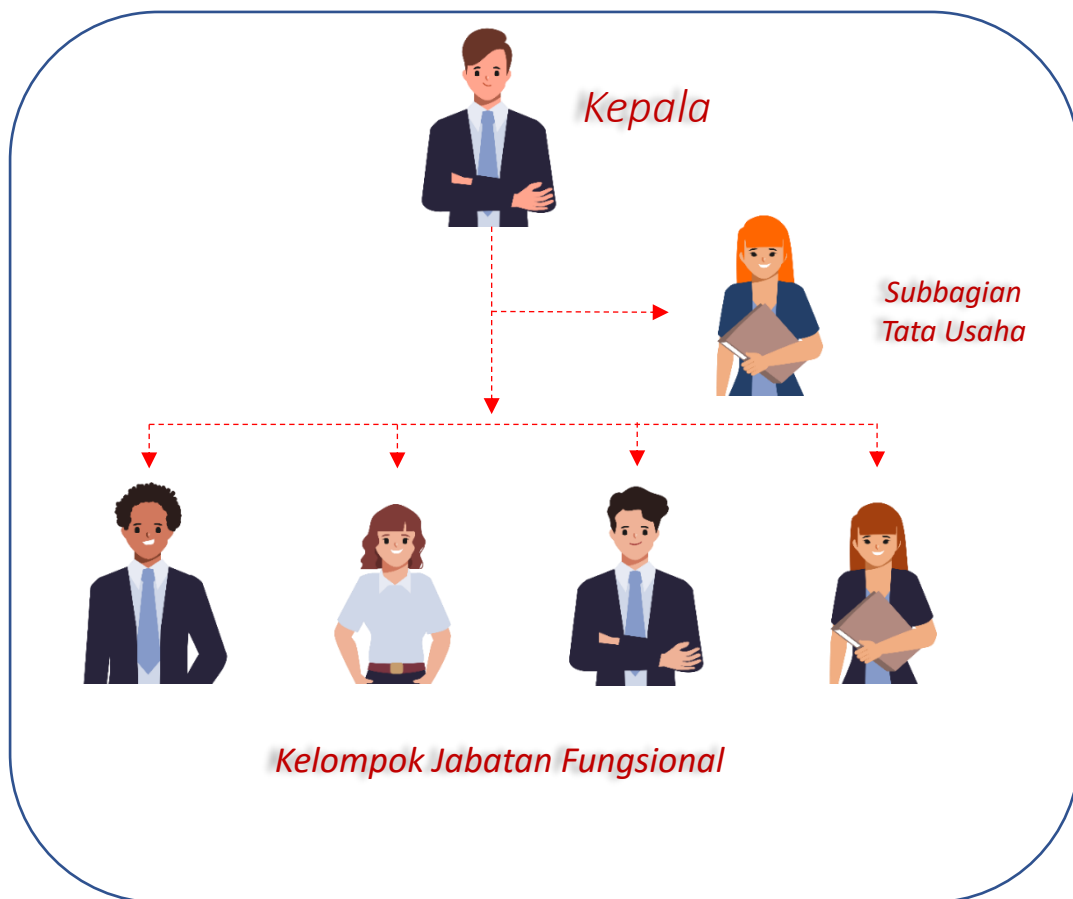
**FUNGSI
LPMP**

1. Pemetaan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Pelaksanaan supervisi satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penjaminan mutu nasional;
4. Pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan dasar dan Menengah secara nasional;
5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
7. Pelaksanaan urusan administrasi.

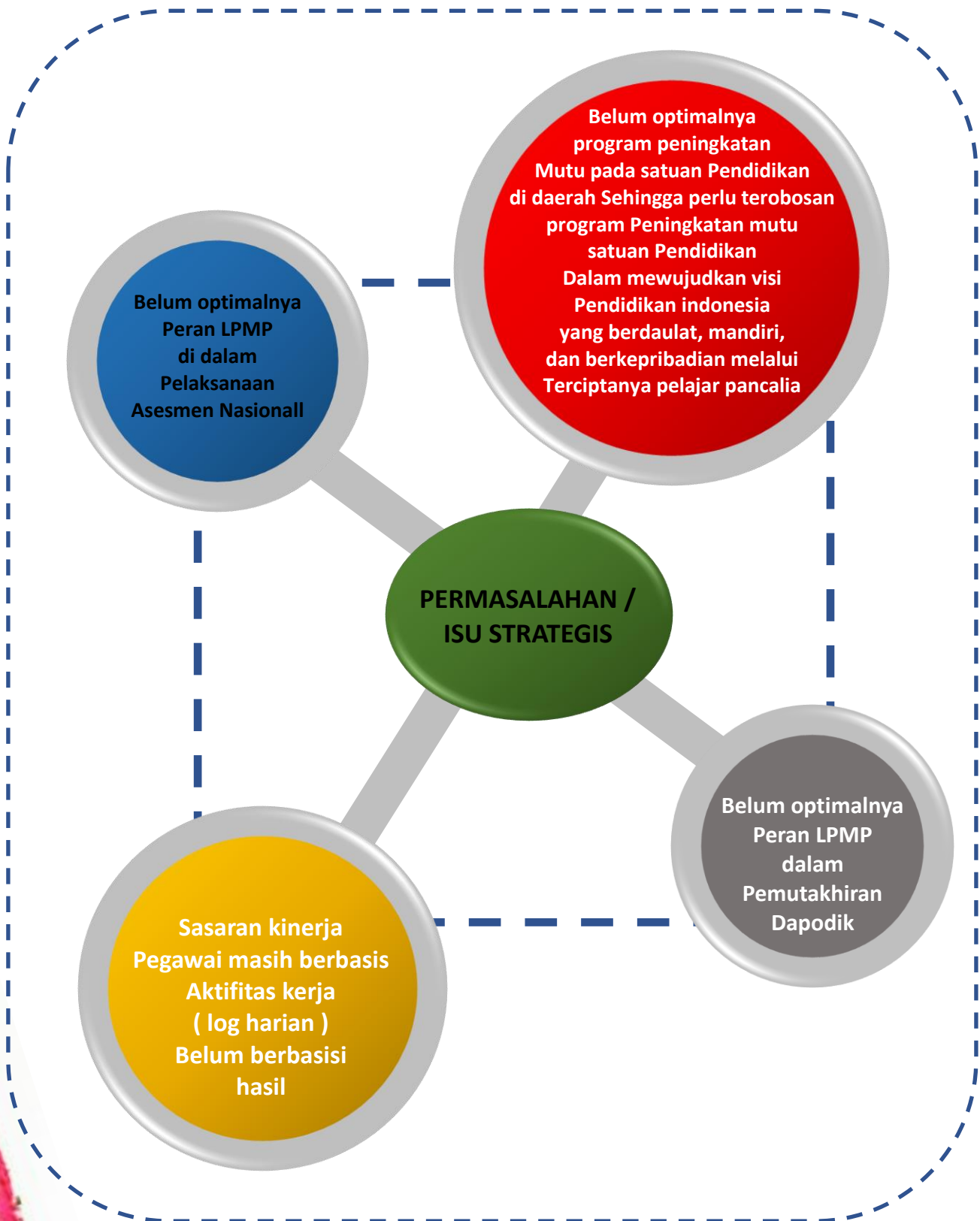
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA

Struktur organisasi LPMP Provinsi Sumatera Utara terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.3. Struktur Organisasi LPMP

D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN UTAMA**Gambar 1.4. Permasalahan/Isu Strategis LPMP Provinsi Sumatera Utara**



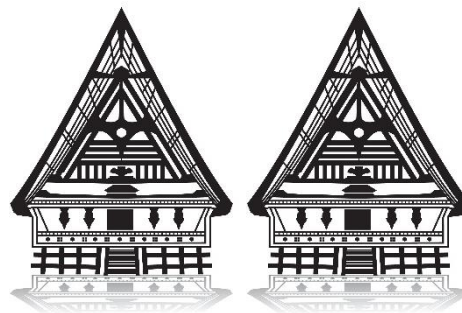
BAB

2

**PERENCANAAN
KINERJA**

BAB - II

PERENCANAAN KINERJA



VISI

"Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global"

MISI :

Upaya LPMP Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai visi yang telah ditetapkan dilakukan dengan melaksanakan misi yang juga merupakan penyelenggaraan fungsi lembaga sesuai Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 Pasal 44 sebagai berikut:

- (M1) Melaksanakan pemetaan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- (M2) Melaksanakan supervisi satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
- (M3) Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
- (M4) Melaksanakan pengembangan model penjaminan mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah secara nasional;
- (M5) Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
- (M6) Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- (M7) Melaksanakan urusan administrasi dan tata kelola kelembagaan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

Tujuan Strategis :

1. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
2. Perwujudan tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di lingkungan LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1. Tahapan Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Penjaminan Mutu Pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja satuan pendidikan (indeks mutu) minimal 75	26,50%	27,4%	28,3%	29,2%	30,1%
		1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	5%	5%	5%	5%
		1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95%	95,2%	95,4%	95,6%	95,8%
2	Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara	2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara	BB	BB	A	A	A
		2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	81	82	83	84	85

Tabel 2.2. Target Kinerja Yang Terdapat Pada Perjanjian Kinerja Final per November 2021.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1.1. Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki kinerja satuan pendidikan (indeks mutu) minimal 75 1.2. Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	27,4% 5,0% 95,2%
2.	Terwujudnya tata kelola LPMP yang baik	2.1. Predikat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara 2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L	BB 82

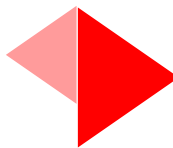
Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas .	Rp. 6.532.207.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.	Rp. 22.978.541.000

Penjelasan ringkas atas perubahan Perjanjian Kinerja antara Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen :

**29 Januari 2021**

Perjanjian Kinerja awal yang ditandatangani oleh Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Afrizal Sihotang, S.T., M.Si dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Jumeri, S.TP., M.Si dengan pagu anggaran Rp. 37.175.515.000,-

**29 November 2021**

Perubahan Perjanjian Kinerja karena perubahan anggaran menjadi Rp. 29.510.748.000,- ditandatangani oleh Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Afrizal Sihotang, S.T., M.Si dengan Direktur Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Jumeri, S.TP., M.Si.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja disusunlah Rencana Aksi yang merupakan dokumen tindak lanjut rencana pelaksanaan kegiatan yang memuat sasaran, indikator, program, kegiatan, dan anggaran serta jadwal untuk satu tahun ke depan yang dibagi dalam jangka waktu triwulan. Dokumen Rencana Aksi ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan upaya pengembangan kegiatan. Berikut ini adalah Rencana Aksi awal tahun 2021:

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Awal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja satuan pendidikan (<i>scorecard</i>) minimal 75	27.4	0	0	0	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5	0	0	0	5
		[IKK 1.3] Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95.2	0	0	0	95.2
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB	-	-	-	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82	0	0	0	82

Tabel 2.5. Rencana Aksi Rincian Output

No.	Rincian Output /Komponen	Vol.	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW2	TW 3	TW 4	
1	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 13.451.004.000
2	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 13.451.004.000
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 9.727.912.000
4	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 9.727.912.000
5	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0	1	Rp. 941.000.000
6	[051] Pengelolaan Kepegawaian	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 263.000.000
7	[052] Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 143.000.000
8	[054] Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 106.000.000
9	[055] Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 143.000.000
10	[056] Perencanaan Program dan Anggaran	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 143.000.000
11	[058] Pengelolaan Data dan Informasi	10	Kegiatan	1	4	7	10	Rp. 143.000.000
12	Layanan Pengadaan Peralatan	23	Unit	0	23	23	23	Rp. 350.000.000

	Fasilitas Perkantoran							
13	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	23	Unit	0	23	23	23	Rp. 350.000.000
14	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	1431 1	Lembaga	0	0	0	14311	Rp. 12.705.599.000
15	[051] Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu	6	Kegiatan	0	0	6	6	Rp. 111.479.000
16	[052] Analisis Data Mutu	4	Kegiatan	0	0	4	4	Rp. 2.082.520.000
17	[053] Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu	4	Kegiatan	0	0	3	4	Rp. 55.600.000
18	[054] Diseminasi hasil pemetaan mutu	4	Kegiatan	0	0	2	4	Rp. 55.600.000
19	[055] Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan	4	Kegiatan	0	4	4	4	Rp. 54.200.000
20	[061] Sosialisasi Fasilitas Berdasarkan SNP	4	Kegiatan	1	4	4	4	Rp. 55.600.000
21	[062] Bimbingan Teknis Fasilitas Berdasarkan SNP	8	Kegiatan	0	6	8	8	Rp. 111.200.000
22	[063] Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP	4	Kegiatan	0	4	4	4	Rp. 2.978.020.000
23	[064] Diseminasi Hasil	4	kegiatan	0	0	4	4	Rp. 55.600.000

	Fasilitasi Berdasarkan SNP							
24	[065] Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Berdasarkan SNP	6	Kegiatan	0	0	6	6	Rp. 365.200.000
25	[071] Penyusunan Program Supervisi Penjaminan Mutu Pendidikan	4	Kegiatan	0	4	4	4	Rp. 55.600.000
26	[072] Bimbingan Teknis Supervisi	4	Kegiatan	0	0	4	4	Rp. 55.600.000
27	[073] Supervisi Satuan Pendidikan	5	Kegiatan	0	0	5	5	Rp. 3.457.000.000
28	[074] Analisis Supervisi Mutu Pendidikan	4	Kegiatan	0	0	2	4	Rp. 55.600.000
29	[075] Diseminasi dan Evaluasi Hasil Supervisi	4	Kegiatan	0	0	0	4	Rp. 55.600.000
30	[081] Penyusunan Bahan Verifikasi	4	Kegiatan	0	4	4	4	Rp. 55.600.000
31	[082] Bimbingan Teknis Verifikasi Data Mutu Pendidikan	4	Kegiatan	0	2	4	4	Rp. 55.600.000
32	[083] Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan	1431 1	Satuan pendidikan	0	0	1431 1	14311	Rp. 2.495.540.000
33	[084] Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan	4	Kegiatan	0	0	4	4	Rp. 494.440.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 37.175.515.000



BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB - III

AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2021, target kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara terdiri dari dua sasaran kegiatan dan lima indikator kinerja. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari setiap target kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari sasaran kegiatan beserta indikator kinerja serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

1. Sasaran Kegiatan :

“Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan”

1.1. Persentase Satuan Pendidikan (Jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja satuan pendidikan (*scorecard*) minimal 75.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.1

Tahun 2020	Tahun 2021					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja LPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
24,3%	27,4%	38,06%	138,91%	40,22%	94,63%	30,1%	126,4%

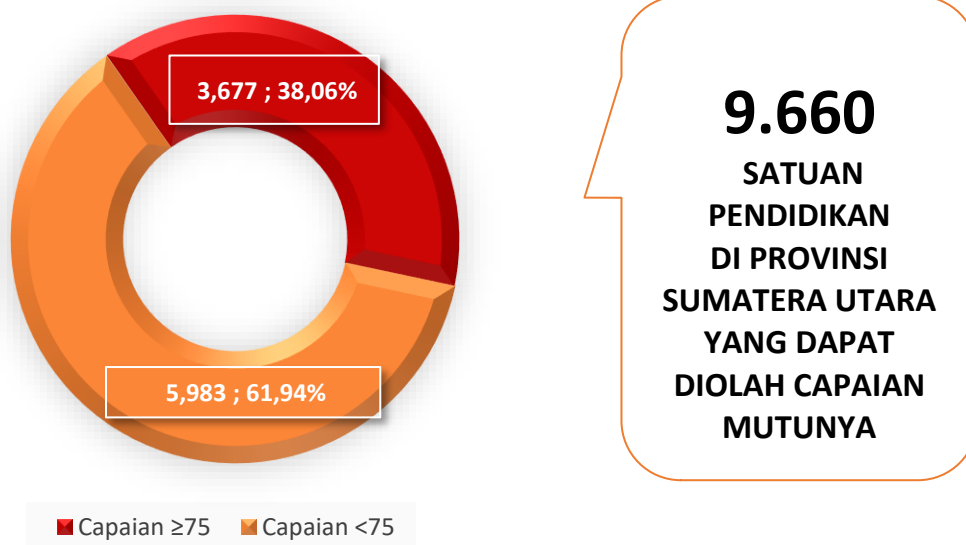
Perhitungan capaian untuk IKK 1.1 menggunakan pendekatan nilai rapor mutu satuan pendidikan dari aplikasi PMP tahun 2020 dengan cara menetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,00 (disetarakan dengan nilai 75).

Tabel 3.2. Persentase Satuan Pendidikan di Sumatera Utara dengan Nilai Rapor Mutu $\geq 6,00$

Nilai $\geq 6,00$		Nilai $< 6,00$		Total Jumlah Satuan Pendidikan
Jumlah Satuan Pendidikan	Persen	Jumlah Satuan Pendidikan	Persen	
3677	38.06	5983	61.94	9660

*sumber: laman PMP tahun 2020.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, terdapat 9.660 satuan pendidikan yang mengirim data mutu dan dapat diolah capaian mutunya. Satuan pendidikan dengan nilai rapor mutu $\geq 6,00$ ada sebanyak 3.677 satuan pendidikan. Dengan demikian persentase jumlah satuan pendidikan yang nilai rapor mutu $\geq 6,00$ adalah sebesar $(3.667/9.660) * 100\% = 38,06\%$.

Grafik 3.1. Grafik Persentase Jumlah Satuan Pendidikan Yang Dapat Diolah Data Mutunya

Jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja yaitu 27,4 %, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKK 1.1 Persentase Satuan Pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja satuan pendidikan (*scorecard*) minimal 75 **telah tercapai**.

Tabel 3.3. Persentase Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Dengan Nilai Rapor Mutu $\geq 6,00$ dibandingkan dengan target IKK 1.1

No.	Nama kab/kota	Jumlah satuan pendidikan dengan nilai $\geq 6,00$	Jumlah satuan pendidikan dengan nilai $< 6,00$	Jumlah satuan pendidikan yang diolah data mutunya.	Persentase satuan pendidikan yang memiliki nilai $\geq 6,00$	Kategori jika dibandingkan dengan target IKK.1.1 sebesar 27,4%
1	Kabupaten Asahan	204	314	518	39.38%	Sesuai
2	Kabupaten Batubara	116	171	287	40.42%	Sesuai
3	Kabupaten Dairi	45	170	215	20.93%	Tidak Sesuai
4	Kabupaten Deli Serdang	422	667	1089	38.75%	Sesuai
5	Kabupaten Humbang Hasudutan	35	172	207	16.91%	Tidak Sesuai
6	Kabupaten Karo	58	195	253	22.92%	Tidak Sesuai
7	Kabupaten Labuhanbatu	82	257	339	24.19%	Tidak Sesuai
8	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	124	165	289	42.91%	Sesuai
9	Kabupaten Labuhanbatu Utara	92	261	353	26.06%	Tidak Sesuai
10	Kabupaten Langkat	242	592	834	29.02%	Sesuai
11	Kabupaten Mandailing Natal	112	269	381	29.40%	Sesuai
12	Kabupaten Nias	44	186	230	19.13%	Tidak Sesuai
13	Kabupaten Nias Barat	16	86	102	15.69%	Tidak Sesuai
14	Kabupaten Nias Selatan	98	308	406	24.14%	Tidak Sesuai
15	Kabupaten Nias Utara	49	87	136	36.03%	Sesuai
16	Kabupaten Padanglawas	59	121	180	32.78%	Sesuai
17	Kabupaten Padanglawas Utara	51	182	233	21.89%	Tidak Sesuai
18	Kabupaten Pakpak Bharat	18	46	64	28.13%	Sesuai
19	Kabupaten Samosir	40	119	159	25.16%	Tidak Sesuai
20	Kabupaten Serdang Bedagai	182	277	459	39.65%	Sesuai
21	Kabupaten Simalungun	262	508	770	34.03%	Sesuai
22	Kabupaten Tapanuli Selatan	95	203	298	31.88%	Sesuai
23	Kabupaten Tapanuli Tengah	69	232	301	22.92%	Tidak Sesuai
24	Kabupaten Tapanuli Utara	97	175	272	35.66%	Sesuai
25	Kabupaten Toba	34	138	172	19.77%	Tidak Sesuai
26	Kota Binjai	137	102	239	57.32%	Sesuai
27	Kota Gunungsitoli	40	91	131	30.53%	Sesuai
28	Kota Medan	651	515	1166	55.83%	Sesuai
29	Kota Padangsidimpuan	42	109	151	27.81%	Sesuai
30	Kota Pematangsiantar	97	147	244	39.75%	Sesuai

31	Kota Sibolga	26	41	67	38.81%	Sesuai
32	Kota Tanjung Balai	37	81	118	31.36%	Sesuai
33	Kota Tebing Tinggi	49	64	113	43.36%	Sesuai
	Grand Total	3725	7051	10776	34.57%	Sesuai

Dari 33 kabupaten/kota terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk kategori “tidak sesuai” dan 21 kabupaten/kota masuk kategori “sesuai” jika mengacu pada target IKK 1.1 sebesar 27,4%.

Tabel 3.4. Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.1.

No.	Hambatan Dalam Merealisasikan Target pada IKK 1.1	Solusi yang dilakukan
1.	Tidak adanya hasil rapor mutu tahun 2021 untuk mengukur nilai kinerja satuan pendidikan (<i>scorecard</i>).	Perhitungan IKK 1.1 masih menggunakan pendekatan dengan sumber data hasil rapor mutu tahun 2020.
2.	Keterbatasan anggaran pemerintah Kabupaten/Kota untuk pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.	Kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan pemerintah daerah melalui Program Sekolah Penggerak dimana terdapat pembagian peran dan tanggung jawab terkait anggaran dalam pemenuhan mutu Standar Nasional Pendidikan.
3.	Sinergi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah belum optimal.	Membuat Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi dalam hal ini Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen dengan pemerintah daerah berisi komitmen daerah dalam mendukung Program Sekolah Penggerak.
4.	Terbatasnya kewenangan LPMP terhadap satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.	Melalui Program Sekolah Penggerak, LPMP Provinsi Sumatera Utara semakin berperan sebagai perwakilan Kemendikbud - Ristek dalam melakukan komunikasi langsung ke pemerintah daerah agar terjadi sinergisitas kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

1.2. Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan Survei Karakter Antara Satuan pendidikan dengan Kinerja Terbaik dan Kinerja Terburuk.

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.2

Tahun 2020	Tahun 2021					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja LPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
3,4%	5%	4,40%	113,64%	3,05%	69,32%	5%	113,64%

Perhitungan capaian untuk IKK 1.2 menggunakan hasil Asesmen Nasional tahun 2021.

Kategori hasil Asesmen Nasional literasi, numerasi dan survei karakter adalah sebagai berikut :

Kategori hasil Asesmen Literasi :

1	Literasi perlu intervensi khusus jauh di bawah kompetensi minimum
2	Literasi dasar di bawah kompetensi minimum
3	Literasi cakap mencapai kompetensi minimum
4	Literasi mahir di atas kompetensi minimum

Kategori hasil Asesmen Numerasi :

1	Numerasi perlu intervensi khusus jauh di bawah kompetensi minimum
2	Numerasi dasar di bawah kompetensi minimum
3	Numerasi cakap mencapai kompetensi minimum
4	Numerasi mahir di atas kompetensi minimum

Kategori hasil Survey Karakter :

1	Belum terinternalisasi
2	Perlu dikembangkan
3	Berkembang
4	Membudaya

Tabel 3.6. Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Literasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Jenjang	BELUM MENCAPAI		MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM	
	Literasi perlu intervensi khusus jauh di bawah kompetensi minimum	Literasi dasar di bawah kompetensi minimum	Literasi cakap Mencapai kompetensi minimum	Literasi mahir di atas kompetensi minimum
SD	34,575	65,531	86,319	4,379
SMP	14,602	32,797	32,788	3,728
SMPLB	9	16	17	-
SDLB	6	17	36	1
SMA	1,032	16,924	14,944	3,000
SMALB	1	19	9	-
Jumlah	50,225	115,304	134,113	11,108

Tabel 3.7. Persentase Kesenjangan Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Literasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	Kategori	Asesmen Literasi (siswa)	
		Nasional	Sumatera Utara
1	Literasi perlu intervensi khusus jauh di bawah kompetensi minimum	609,095	50,225
2	Literasi dasar di bawah kompetensi minimum	1,444,004	115,304
3	Literasi cakap mencapai kompetensi minimum	2,153,072	134,113
4	Literasi mahir di atas kompetensi minimum	283,437	11,108
	Jumlah	4,489,608	310,750
	Persentase Kesenjangan	3,55%	6,16%

Tabel 3.8. Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Numerasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

BELUM MENCAPAI		MENCAPAI KOMPETENSI MINIMUM		
Jenjang	Numerasi Perlu Intervensi Khusus Jauh di bawah kompetensi minimum	Numerasi Dasar Di bawah kompetensi Minimum	Numerasi cakap mencapai kompetensi minimum.	Numerasi Mahir di atas kompetensi minimum
SD	40,086	96,020	51,511	3,132
SMP	8,673	49,680	24,058	2,220
SMPLB	3	26	13	-
SDLB	12	28	18	3
SMA	2,689	22,154	8,499	2,695
SMALB	1	13	11	4
Jumlah	51,464	167,921	84,110	8,054

Tabel 3.9. Persentase Kesenjangan Hasil Asesmen Nasional pada Kompetensi Numerasi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	Kategori	Asesmen Numerasi (siswa)	
		Nasional	Sumatera Utara
1	Numerasi perlu intervensi khusus jauh di bawah kompetensi minimum	631,529	51,464
2	Numerasi dasar di bawah kompetensi minimum	2,361,522	167,921
3	Numerasi cakap mencapai kompetensi minimum	1,360,384	84,110
4	Numerasi mahir di atas kompetensi minimum	142,382	8,054
	Jumlah	4,495,817	311,549
	Persentase kesenjangan	5,33%	6,83%

Tabel 3.10. Persentase kesenjangan Hasil Survei Karakter di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	Kategori	Survei Karakter (Siswa)	
		Nasional	Sumatera Utara
1	Belum terinternalisasi	6,141	310
2	Perlu dikembangkan	93,153	7,058
3	Berkembang	68,571	4,022
4	Membudaya	30,086	1,604
Jumlah		197,951	12,994
Persentase Kesenjangan		0,26%	0,20%

Tabel 3.11. Persentase Kesenjangan Hasil AKM dan Survei Karakter

No.	Asesmen Nasional	Persentase kesenjangan secara Nasional	Persentase kesenjangan di Sumatera Utara
1	Literasi	3,55 %	6,16 %
2	Numerasi	5,33 %	6,83 %
3	Karakter	0,26 %	0,20 %
	Rata-rata	3,05 %	4,40 %

Berdasarkan tabel 3.11 di atas dapat dilihat bahwa persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter adalah sebesar 4,40 %. Jika dibandingkan dengan target yang ada pada perjanjian kinerja yaitu maksimal 5% maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk IKK 1.2 persentase kesenjangan hasil AKM dan survei karakter antara satuan pendidikan dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk, **sudah tercapai**.

Tabel 3.12. Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.2.

No.	Hambatan Dalam Merealisasikan Target pada IKK 1.2	Solusi yang dilakukan
1.	Asesmen Nasional merupakan kebijakan baru Kemendikbud - Ristek, sehingga masih banyak yang belum memahami maksud dan tujuan diadakannya Asesmen Nasional.	Melakukan rangkaian kegiatan berupa pendampingan, <i>workshop</i> dan monitoring evaluasi terkait pelaksanaan Asesmen Nasional.
2.	Masih terbatasnya kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami teknik Literasi, Numerasi dan Survei Karakter.	Melakukan pendampingan dan supervisi ke satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan Literasi, Numerasi dan Survei Karakter.
3.	Masih banyak infrastruktur satuan pendidikan yang belum memadai melaksanakan Asesmen Nasional.	Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan infrastruktur satuan Pendidikan untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Nasional.
4.	Masih banyak satuan Pendidikan melaksanakan Asesmen Nasional belum sesuai POS.	Melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan terkait persiapan Asesmen Nasional sampai kepada pelaksanaan Asesmen Nasional dan kepatuhan terhadap POS.

1.3. Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan.

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 1.3.

Tahun 2020	Tahun 2021					Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja LPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
97,49%	95,2%	100%	105,04%	98,64%	101,38%	95,8%	104,38%

Nilai Rapor Akurat, Rapor Mutakhir dan Rapor Berkelanjutan tahun 2021 pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3.14. Nilai Rapor Dapodik Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Rapor Akurat	Rapor Mutakhir	Rapor Berkelanjutan	Nilai Rapor Rata-rata
1	Kabupaten Labuhanbatu	98.68	99.66	99.76	99.37
2	Kabupaten Tapanuli Selatan	97.99	99.61	99.72	99.11
3	Kota Gunungsitoli	97.79	99.16	100.00	98.98
4	Kabupaten Nias Utara	97.90	98.92	100.00	98.94
5	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	98.31	99.93	98.54	98.93
6	Kota Medan	97.78	99.66	99.11	98.85
7	Kota Pematangsiantar	96.88	99.85	99.44	98.72
8	Kabupaten Nias	96.61	99.17	100.00	98.59
9	Kabupaten Humbang Hasudutan	95.97	99.73	100.00	98.56
10	Kota Padangsidimpuan	96.44	99.50	99.69	98.54
11	Kabupaten Tapanuli Tengah	96.53	99.28	99.78	98.53
12	Kabupaten Samosir	96.11	99.60	99.80	98.50
13	Kabupaten Nias Barat	96.72	99.20	99.57	98.50
14	Kota Binjai	96.45	99.71	99.08	98.41
15	Kabupaten Nias Selatan	96.29	99.27	99.67	98.41
16	Kabupaten Tapanuli Utara	95.42	99.73	100.00	98.38
17	Kabupaten Simalungun	96.29	99.01	99.81	98.37
18	Kabupaten Deli Serdang	96.75	99.60	98.74	98.36
19	Kabupaten Padanglawas Utara	95.74	99.65	99.56	98.32
20	Kabupaten Serdang Bedagai	95.83	99.81	99.25	98.30
21	Kabupaten Padanglawas	95.55	99.61	99.71	98.29
22	Kabupaten Toba	95.78	99.49	99.60	98.29
23	Kabupaten Batubara	95.85	99.66	99.22	98.24
24	Kabupaten Mandailing Natal	95.39	99.52	99.72	98.21
25	Kabupaten Karo	95.23	99.55	99.62	98.13
26	Kabupaten Pakpak Bharat	95.40	98.94	100.00	98.11
27	Kabupaten Labuhanbatu Utara	95.63	99.37	99.28	98.09
28	Kabupaten Dairi	95.31	99.28	99.66	98.08
29	Kabupaten Asahan	95.72	99.31	99.18	98.07

30	Kota Tebing Tinggi	96.43	100.00	97.56	98.00
31	Kabupaten Langkat	95.72	99.36	98.88	97.99
32	Kota Tanjung Balai	96.27	99.67	97.75	97.90
33	Kota Sibolga	96.84	99.71	95.65	97.40
Grand Total		96.41	99.50	99.31	98.41

Berdasarkan Tabel 3.14 terlihat bahwa nilai rapor rata-rata dapodik dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki nilai diatas target IKK 1.3 sebesar 95,2%. Dengan demikian realisasi IKK 1.3 adalah 100%.

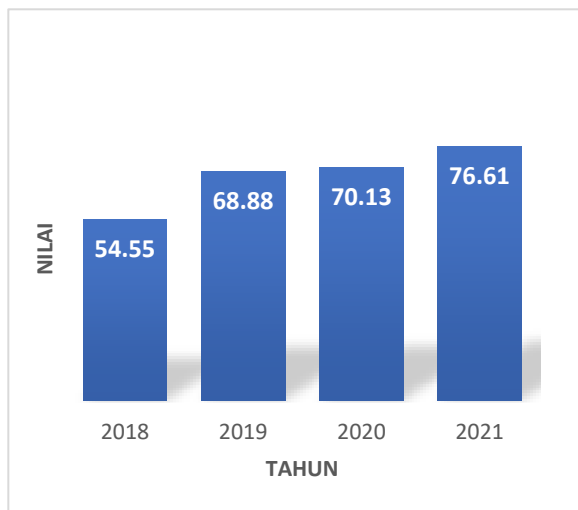
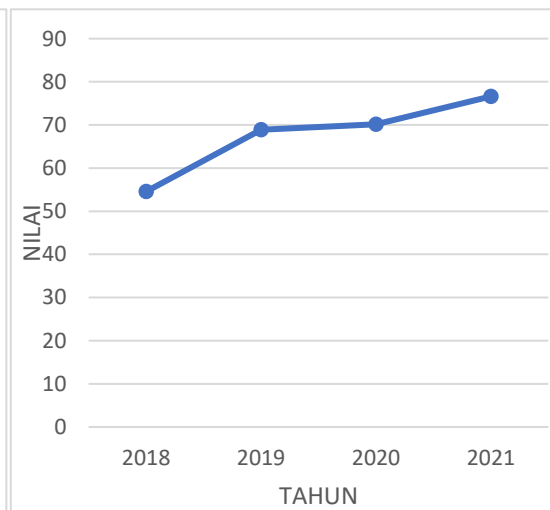
Tabel 3.15. Hambatan Dan Solusi Dalam Merealisasikan Target Pada IKK 1.3.

No.	Hambatan Dalam Merealisasikan Target pada IKK 1.3	Solusi yang dilakukan
1.	Masih ditemukan data satuan pendidikan yang sudah tutup namun masih terdaftar di dapodik.	Pemutakhiran data dilakukan secara berkelanjutan.
2.	Aplikasi dapodik terus melakukan pembaharuan, sehingga perlu waktu untuk memahami kembali.	LPMP Provinsi Sumatera Utara menginformasikan setiap perubahan aplikasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
3.	Operator dapodik sering berganti, sehingga menghambat proses pengisian dapodik.	Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan pelatihan bagi operator.
4.	Belum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.	Perlu regulasi yang mengatur keterlibatan LPMP dalam kegiatan dapodik.

Selain IKK 1.1 , IKK 1.2 dan IKK 1.3 yang telah diuraikan capaian kinerjanya di atas, pada Renstra LPMP Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2024 telah ditetapkan IKK 2.1 untuk pencapaian Predikat SAKIP dan IKK 2.2 untuk pencapaian Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

2. Sasaran Kegiatan :**“Meningkatnya Tata Kelola LPMP Provinsi Sumatera Utara ”****2.1. Predikat SAKIP****Tabel 3.16. Capaian Kinerja Berdasarkan IKK 2.1**

Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja LPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
BB	BB	BB	-	-	-	A	-
70,13	75	76,61	102,15%	-	-	82	93,4%

**Grafik 3.2. Nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara****Grafik 3.3. Capaian Peringkat SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara**

Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 nilai SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara terus mengalami peningkatan. Nilai SAKIP tahun 2020 adalah 70,13 dan LPMP Provinsi Sumatera Utara menargetkan untuk tahun 2021 mendapatkan nilai minimal 75,00. Pada akhirnya di tahun 2021 terealisasi nilai SAKIP = 76,61 dan masih dengan predikat BB atau sangat baik. Predikat BB ini dapat diinterpretasikan bahwa terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 (dua per tiga) unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat

baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu pegawai.

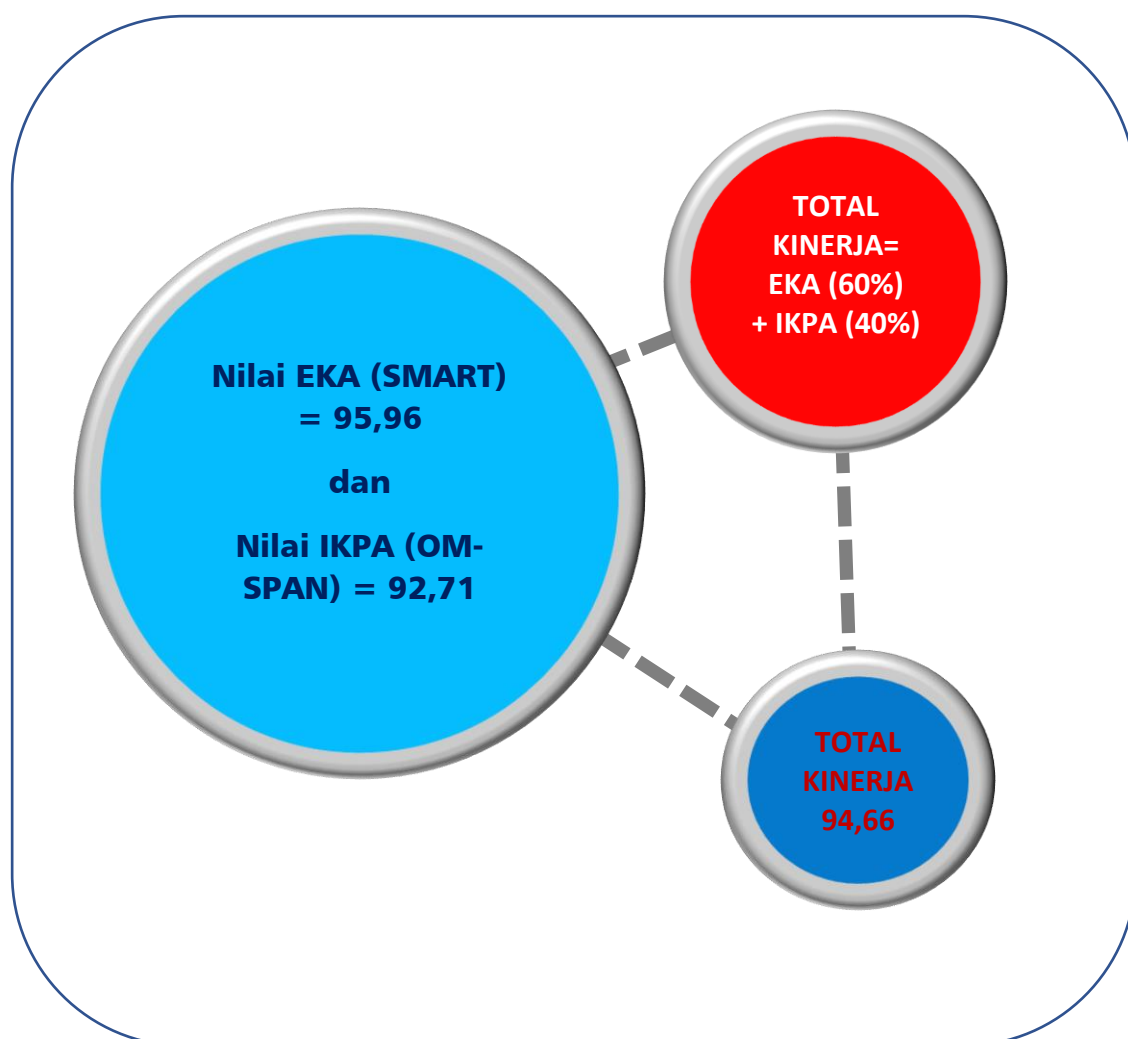
Adanya peningkatan nilai SAKIP tersebut sebagai indikator terwujudnya tata kelola LPMP Provinsi Sumatera Utara yang lebih baik.

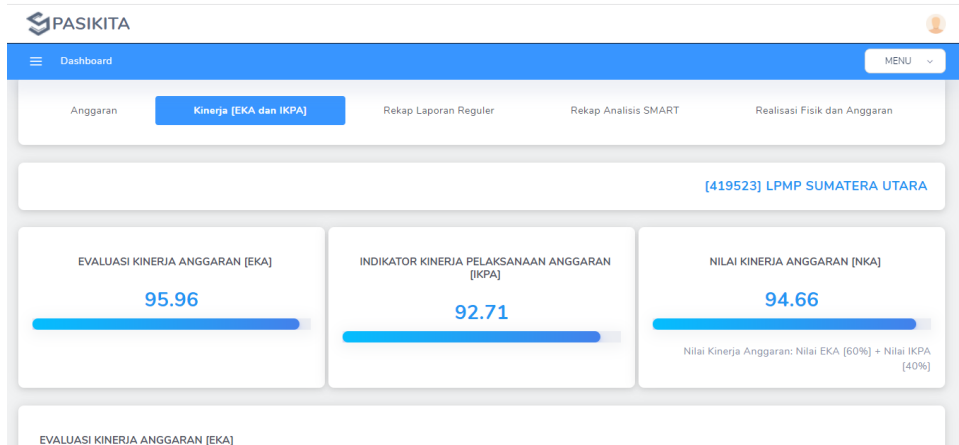
Upaya untuk mendukung tingkat capaian tata kelola lembaga yang baik yaitu:

1. Membentuk Tim SAKIP yang kompak dalam melaksanakan siklus implementasi SAKIP.
2. Menerapkan Siklus Manajemen Kinerja yang Terintegrasi, antara lain:
 - a. Perencanaan kinerja yang berkualitas, yaitu menetapkan tujuan, sasaran, target, dan melakukan penyalarsan tugas dan fungsi mulai dari tingkat Kementerian dan dapat diturunkan hingga level individu (SKP/PK Individu). Hal ini untuk memastikan bahwa capaian kinerja lembaga secara keseluruhan dapat terlihat dari hasil kinerja individu pegawai sesuai dengan SKP masing-masing.
 - b. Pengoptimalan pencapaian target kinerja, yaitu dengan melibatkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh lembaga untuk mendukung tingkat pencapaian target kinerja lembaga.
 - c. Pengukuran kinerja minimal sebulan sekali, dilakukan untuk mengukur pencapaian target per periode, agar dapat direviu dan dilakukan perbaikan yang berkelanjutan.
 - d. Perbaikan kinerja, sebagai umpan balik perencanaan kinerja.
3. Memperhatikan isu-isu strategis yang terjadi serta adanya perubahan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang berpengaruh pada lembaga, sehingga LPMP Provinsi Sumatera Utara dapat menentukan arah kebijakan dan strategi di masa yang akan datang.
4. Perbaikan layanan secara keseluruhan, serta menciptakan inovasi layanan baik yang dilakukan secara *online* maupun *offline*.

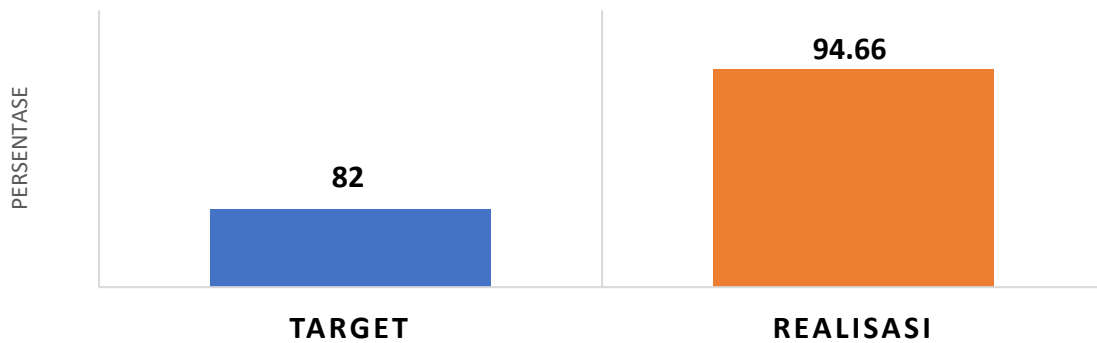
2.2. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L**Tabel 3.17. Capaian Kinerja Anggaran**

Tahun 2020		Tahun 2021				Tahun 2024 (Akhir Renstra)	
Realisasi	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Realisasi Nasional	Capaian Kinerja LPMP dibanding Nasional	Target Akhir Renstra 2024	% Capaian Target Akhir Renstra 2024
95,43	82	94,66	115,44%	-	-	85	111,36%



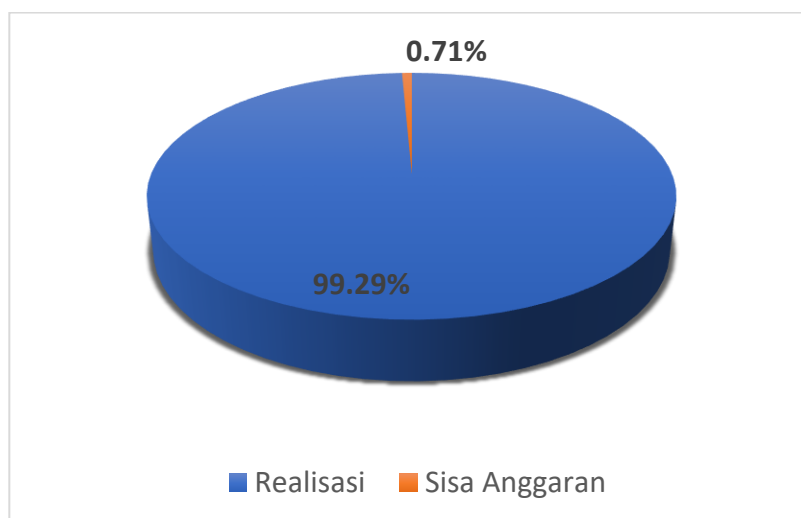


Gambar 3.1. Tangkapan Layar Aplikasi SPASIKITA



Grafik 3.4. Capaian Kinerja Anggaran LPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

B. Realisasi Anggaran



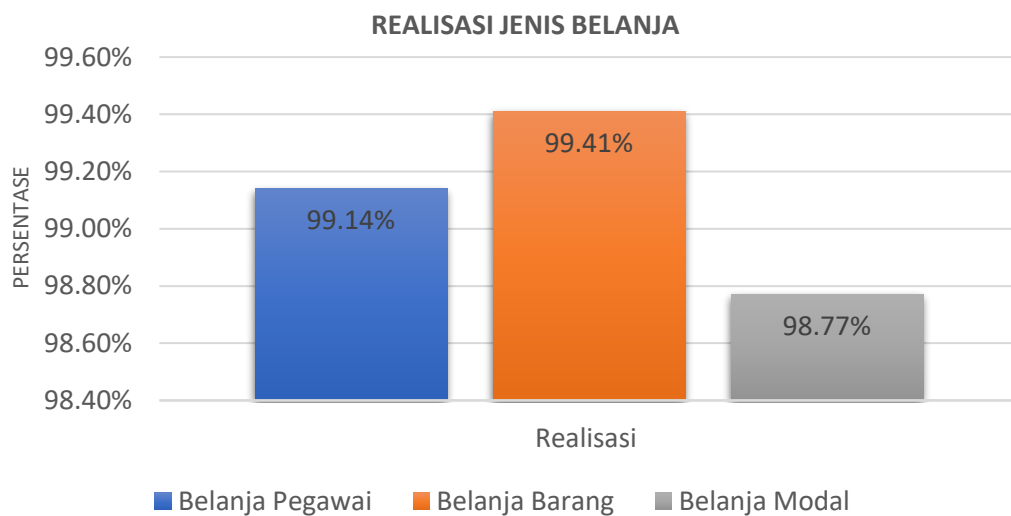
Grafik 3.5. Persentase Kinerja Anggaran Tahun 2021

Tabel 3.18. Alokasi, Realisasi dan Persentase Daya Serap Anggaran Tahun 2021

Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Daya Serap
Rp 29.510.748.000	Rp 29.302.366.289	99,29%

Tabel 3.19. Realisasi Anggaran Perjenis Belanja Tahun 2021

Kode	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Daya Serap
51	Belanja Pegawai	11.962.757.000,-	11.859.425.446,-	99,14%
52	Belanja Barang	17.199.419.000,-	17.098.648.343,-	99,41%
53	Belanja modal	348.572.000,-	344.292.500,-	98,77%
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

**Grafik 3.6. Persentase Kinerja Anggaran Berdasarkan Realisasi Jenis Belanja**

Tabel 3.20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output

Kode	Uraian	Total			
		Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran
419523	LPMP SUMATERA UTARA	29.510.748.000	29.302.366.289	99,29	208.381.711
6397.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6.532.207.000	6.432.672.982	98,48	99.534.018
2005.EAA	Layanan Perkantoran	21.690.669.000	21.586.100.807	99,52	104.568.193
2005.EAC	Layanan Umum	939.300.000	939.300.000	100,00	0
2005.EAD	Layanan Sarana Internal	348.572.000	344.292.500	98,77	4.279.500
TOTAL		29.510.748.000	29.302.366.289	99,29	208.381.711

C. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Tahun Anggaran 2021.

1. Program Sekolah Penggerak (PSP).

Rangkaian kegiatan terkait dengan Program Sekolah Penggerak yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara antara lain:

- Pendampingan Perencanaan Program Sekolah Penggerak;
- Verifikasi Data Implementasi Program Sekolah Penggerak Angkatan I;
- Coaching Clinique* Program Sekolah Penggerak Kepada Kepala Sekolah Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Peringkat dan Pleno Penetapan Peringkat Sekolah Penggerak;
- Pleno Kelulusan Program Sekolah Penggerak;
- Forum Pemangku Kepentingan Daerah;
- Monitoring Keterlaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Hasil yang dicapai dari rangkaian kegiatan Program Sekolah Penggerak antara lain sebagai berikut :

1. Pendampingan Perencanaan Program Sekolah Penggerak, kegiatan yang dilaksanakan adalah Pendampingan Pembuatan Video Komitmen Kepala Daerah dan Penandatanganan Naskah Nota Kesepahaman Program Sekolah Penggerak Angkatan II.

Hasilnya:

- a. Berhasil diperoleh sebanyak 10 (sepuluh) rangkap 2 (dua) Naskah Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani Kepala Daerah sasaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 2, yaitu: 1) Kabupaten Padanglawas Utara, 2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 3) Kabupaten Tapanuli Selatan, 4) Kabupaten Tapanuli Utara, 5) Kabupaten Dairi, 6) Kabupaten Nias, 7) Kabupaten Nias Barat, 8) Kota Binjai, 9) Kota Padangsidimpuan dan 10) Kota Sibolga.
- b. Berhasil diperoleh sebanyak 10 (sepuluh) Rekaman Pernyataan Komitmen Dukungan Kepala Daerah terhadap implementasi Program Sekolah Penggerak Angkatan II pada daerah binaannya, yaitu: 1) Kabupaten Padanglawas Utara, 2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 3) Kabupaten Tapanuli Selatan, 4) Kabupaten Tapanuli Utara, 5) Kabupaten Dairi, 6) Kabupaten Nias, 7) Kabupaten Nias Barat, 8) Kota Binjai, 9) Kota Padangsidimpuan dan 10) Kota Sibolga.

Kendala / Permasalahan

- 1) Adanya kepala daerah yang akan habis masa jabatannya
- 2) Padatnya kegiatan kepala daerah sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Solusi

- 1) Meminta pemerintah daerah tetap menampilkan kepala daerah yang akan habis masa tugasnya, meyakinkan pemerintah daerah bahwa video dan nota kesepahaman dapat diganti oleh kepala daerah yang baru jika dibutuhkan.
- 2) Dilakukan penyesuaian jadwal yang telah ditentukan oleh kepala daerah untuk melaksanakan pembuatan video dan penandatanganan nota kesepahaman.

2. Verifikasi Data Implementasi Program Sekolah Penggerak Angkatan I

Hasilnya:

- a. Berhasil diperoleh data kondisi awal 166 sekolah penggerak dari 6 (enam) kabupaten/kota sasaran Program Sekolah Penggerak Angkatan I, yaitu: 1) Kabupaten Deliserdang, 2) Kabupaten Serdang Bedagai, 3) Kabupaten Karo, 4) Kabupaten Batubara, 5) Kabupaten Asahan dan 6) Kota Medan.
- b. Berhasil dianalisis data kondisi awal 166 sekolah penggerak Program Sekolah Penggerak Angkatan I sebagai materi Pertemuan *Project Management Office* (PMO) yang dilaksanakan setiap bulannya.

Kendala/Permasalahan

- 1) Adanya kepala satuan pendidikan yang tidak ada di tempat pada saat diverifikasi
- 2) Kurangnya dokumentasi yang memadai untuk mendukung data yang diberikan.

Solusi

- 1) Menghubungi kepala satuan pendidikan untuk menunjuk siapa yang akan diberi wewenang untuk memberikan data.
- 2) Memanfaatkan dokumen yang ada sembari melengkapi dokumentasi yang dibutuhkan.

3. *Coaching Clinique* Program Sekolah Penggerak Kepada Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB.

Hasil:

- a. Berhasil didampingi calon kepala sekolah penggerak jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota sasaran Program Sekolah Penggerak Angkatan II, yaitu: 1) Kabupaten Padanglawas Utara, 2) Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 3) Kabupaten Tapanuli Selatan, 4) Kabupaten Tapanuli Utara, 5) Kabupaten Dairi, 6) Kabupaten Nias, 7) Kabupaten Nias Barat, 8) Kota Binjai, 9) Kota Padangsidimpuan dan 10) Kota Sibolga
- b. Kepala satuan pendidikan yang mendaftar dapat dilihat pada lampiran.
- c. Berhasil dianalisis data kondisi awal 166 sekolah penggerak pada Program Sekolah Penggerak Angkatan I sebagai materi Pertemuan PMO yang dilaksanakan setiap bulannya.
- d. Persentase pendaftar sesuai target dari seluruh populasi sekolah perjenjang yang mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak Angkatan II

Tabel 3.21. Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD

No	Kabupaten/Kota	Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang PAUD				Keterangan
		Target	Daftar	%Target	%Daftar	
1.	Kabupaten Asahan	34	43	>20%	33%	Melampaui Target
2.	Kabupaten Batubara	17	25	>20%	34%	Melampaui Target
3.	Kabupaten Dairi	7	29	>20%	100%	Melampaui Target
4.	Kabupaten Deliserdang	176	178	>20%	24%	Melampaui Target
5.	Kabupaten Karo	27	16	>20%	14%	Mendekati Target
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	26	23	>20%	22%	Melampaui Target
7.	Kabupaten Nias Barat	17	12	>20%	18%	Mendekati Target
8.	Kabupaten Nias Selatan	18	22	>20%	27%	Melampaui Target
9.	Kabupaten Padanglawas Utara	5	30	>20%	100%	Melampaui Target
10.	Kabupaten Serdang Bedagai	63	39	>20%	15%	Mendekati Target
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	42	44	>20%	28%	Melampaui Target
12.	Kabupaten Tapanuli Utara	11	29	>20%	70%	Melampaui Target
13.	Kota Binjai	22	28	>20%	36%	Melampaui Target
14.	Kota Medan	127	112	>20%	17%	Mendekati Target
15.	Kota Padangsidimpuan	13	27	>20%	43%	Melampaui Target
16.	Kota Sibolga	5	32	>20%	100%	Melampaui Target
Jumlah		610	689	>20%	>20%	Melampaui Target

Tabel 3.22. Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD

No	Kabupaten/Kota	Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SD				Keterangan
		Target	Daftar	%Target	%Daftar	
1.	Kabupaten Asahan	130	125	>20%	22%	Melampaui Target
2.	Kabupaten Batubara	73	72	>20%	28%	Melampaui Target
3.	Kabupaten Dairi	78	80	>20%	25%	Melampaui Target
4.	Kabupaten Deliserdang	-	-	>20%	-	Kena Sanksi
5.	Kabupaten Karo	86	35	>20%	9%	Mendekati Target
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	60	100	>20%	43%	Melampaui Target
7.	Kabupaten Nias Barat	32	49	>20%	37%	Melampaui Target
8.	Kabupaten Nias Selatan	106	86	>20%	11%	Mendekati Target
9.	Kabupaten Padanglawas Utara	66	144	>20%	61%	Melampaui Target
10.	Kabupaten Serdang Bedagai	139	90	>20%	17%	Mendekati Target
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	86	120	>20%	40%	Melampaui Target
12.	Kabupaten Tapanuli Utara	116	67	>20%	15%	Mendekati Target
13.	Kota Binjai	50	60	>20%	30%	Melampaui Target
14.	Kota Medan	-	-	>20%	-	Kena Sanksi
15.	Kota Padangsidimpuan	29	61	>20%	47%	Melampaui Target
16.	Kota Sibolga	10	22	>20%	59%	Melampaui Target
Jumlah		1061	1105	>20%	>20%	Melampaui Target

Tabel 3.23. Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMP

No	Kabupaten/Kota	Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMP				Keterangan
		Target	Daftar	%Target	%Daftar	
1.	Kabupaten Asahan	33	40	>20%	27%	Melampaui Target
2.	Kabupaten Batubara	17	27	>20%	45%	Melampaui Target
3.	Kabupaten Dairi	19	33	>20%	48%	Melampaui Target
4.	Kabupaten Deliserdang	-	-	>20%	-	Kena Sanksi
5.	Kabupaten Karo	19	19	>20%	29%	Melampaui Target
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	15	28	>20%	57%	Melampaui Target
7.	Kabupaten Nias Barat	12	28	>20%	59%	Melampaui Target
8.	Kabupaten Nias Selatan	41	41	>20%	17%	Melampaui Target
9.	Kabupaten Padanglawas Utara	12	26	>20%	61%	Melampaui Target
10.	Kabupaten Serdang Bedagai	27	45	>20%	39%	Melampaui Target
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	15	29	>20%	56%	Melampaui Target
12.	Kabupaten Tapanuli Utara	24	35	>20%	33%	Melampaui Target
13.	Kota Binjai	15	29	>20%	55%	Melampaui Target
14.	Kota Medan	114	50	>20%	9%	Mendekati Target
15.	Kota Padangsidimpuan	8	19	>20%	62%	Melampaui Target
16.	Kota Sibolga	4	9	>20%	64%	Melampaui Target
Jumlah		375	459	>20%	>20%	Melampaui Target

Tabel 3.24. Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMA

No	Kabupaten/Kota	Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SMA				Keterangan
		Target	Daftar	%Target	%Daftar	
1.	Kabupaten Asahan	205	18	>20%	33%	Melampaui Target
2.	Kabupaten Batubara		11			
3.	Kabupaten Dairi		16			
4.	Kabupaten Deliserdang		37			
5.	Kabupaten Karo		11			
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan		8			
7.	Kabupaten Nias Barat		12			
8.	Kabupaten Nias Selatan		43			
9.	Kabupaten Padanglawas Utara		8			
10.	Kabupaten Serdang Bedagai		17			
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan		8			
12.	Kabupaten Tapanuli Utara		20			
13.	Kota Binjai		12			
14.	Kota Medan		60			
15.	Kota Padangsidimpuan		8			
16.	Kota Sibolga		4			
Provinsi Sumatera Utara		205	293	>20%	33%	

Tabel 3.25. Persentase Daftar Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SLB

No	Kabupaten/Kota	Calon Kepala Satuan Pendidikan Jenjang SLB				Keterangan
		Target	Daftar	%Target	%Daftar	
1.	Kabupaten Asahan	9	2	>20%	42%	Melampaui target
2.	Kabupaten Batubara		0			
3.	Kabupaten Dairi		0			
4.	Kabupaten Deliserdang		5			
5.	Kabupaten Karo		0			
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan		0			
7.	Kabupaten Nias Barat		0			
8.	Kabupaten Nias Selatan		0			
9.	Kabupaten Padanglawas Utara		1			
10.	Kabupaten Serdang Bedagai		1			
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan		1			
12.	Kabupaten Tapanuli Utara		1			
13.	Kota Binjai		1			
14.	Kota Medan		3			
15.	Kota Padangsidimpuan		2			
16.	Kota Sibolga		0			
Provinsi Sumatera Utara		9	17	>20%	42%	

Kendala / Permasalahan

- 1) Adanya kepala satuan pendidikan yang tidak ada di tempat pada saat diverifikasi
- 2) Kurangnya dokumentasi yang memadai untuk mendukung data yang diberikan.

Solusi

- 1) Menghubungi kepala satuan pendidikan untuk menunjuk siapa yang akan diberi wewenang untuk memberikan data.
- 2) Menghubungi kepala satuan pendidikan melalui telepon/WA untuk melengkapi data yang dibutuhkan

4. Forum Pemangku Kepentingan Daerah (FPKD)

Hasil:

- a. Berhasil dilaksanakannya Forum Pemangku Kepentingan Daerah pada 6 (enam) Kabupaten/Kota sasaran Program Sekolah Penggerak Angkatan I (Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten batubara, Kabupaten Karo, Kabupaten Deliserdang dan Kabupaten Serdang Bedagai) Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah.
- b. Berhasil melibatkan sebanyak 261 orang Pemangku Kepentingan Daerah dalam implementasi Program Sekolah Penggerak meliputi Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Program Sekolah Penggerak Angkatan I, Pejabat Cabang Dinas Pendidikan Program Sekolah Penggerak Angkatan I, Orang Tua Murid, Murid, Tokoh Masyarakat, Pemerhati Pendidikan, Dewan Pendidikan, Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang membidangi pendidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi.

Kendala / Permasalahan

- 1) Jarak waktu persiapan dan pelaksanaan yang sangat singkat
- 2) Sulitnya menghubungi Pemangku Kepentingan yang akan hadir dalam forum.

Solusi

- 1) Melakukan kordinasi yang intensif dengan dinas pendidikan sasaran FPKD.
- 2) Melakukan kordinasi yang intensif dengan dinas pendidikan sasaran FPKD dan berkomunikasi langsung dengan calom pemangku kepentingan yang akan dihadirkan pada forum.

5. Rapat Pleno Penentuan Kelulusan Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak Angkatan II

Hasil:

- Berhasil diverifikasinya seluruh calon satuan pendidikan penggerak berdasarkan status kepala satuan pendidikan, lokasi satuan pendidikan, status satuan pendidikan negeri/swasta dan status DAPODIK kepala satuan pendidikan calon kepala sekolah penggerak.
- Berhasil divalidasi calon kepala satuan pendidikan penggerak Program Sekolah Penggerak Angkatan II
- Berhasil ditetapkan kepala satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II dan kepala satuan pendidikan cadangan Program Sekolah Penggerak Angkatan II.
- Jumlah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Provinsi Sumatera Utara Angkatan II.

Tabel 3.26. Jumlah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Provinsi Sumatera Utara Angkatan II

No.	Kabupaten/Kota	JENJANG										Jumlah
		PAUD		SD		SMP		SMA		SLB		
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	
1.	Kabupaten Asahan	0	4	13	4	3	4	1	2	0	0	31
2.	Kabupaten Batubara	0	2	11	1	4	0	0	2	0	0	20
3.	Kabupaten Dairi	0	1	11	3	2	1	1	2	0	0	21
4.	Kabupaten Deliserdang	7	14	0	0	0	0	3	12	0	2	38
5.	Kabupaten Karo	1	2	6	3	6	1	0	0	0	0	19
6.	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	0	3	8	2	2	1	3	0	0	0	19
7.	Kabupaten Nias Barat	1	1	5	0	3	0	2	0	0	0	12
8.	Kabupaten Nias Selatan	1	1	17	1	7	0	4	1	0	0	32
9.	Kabupaten Padanglawas Utara	0	1	11	0	2	1	1	1	0	0	17

10.	Kabupaten Serdang Bedagai	0	7	18	6	2	2	1	3	0	0	39
11.	Kabupaten Tapanuli Selatan	0	5	14	0	3	0	2	0	1	0	25
12.	Kabupaten Tapanuli Utara	0	1	8	1	4	0	1	2	1	0	18
13.	Kota Binjai	0	2	6	2	2	0	1	1	0	0	14
14.	Kota Medan	1	13	17	4	4	11	1	12	0	2	66
15.	Kota Padangsidimpuan	1	0	5	0	1	0	0	1	0	0	10
16.	Kota Sibolga	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	5
		12	58	151	28	46	22	23	40	2	4	
Jumlah		70		179		68		63		6		386

Kendala/Permasalahan

- 1) Masih terdapat Kepala Dinas Pendidikan yang berharap kepala satuan pendidikan bisa dimutasi.
- 2) Masih terdapat proses validasi data satuan Pendidikan yang tidak akurat

Solusi

- 1) Mensosialisasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan bahwa Program Sekolah Penggerak merupakan program yang berkelanjutan.
- 2) Melakukan validasi data satuan pendidikan sebelum pelaksanaan pleno kelulusan Program Sekolah Penggerak.

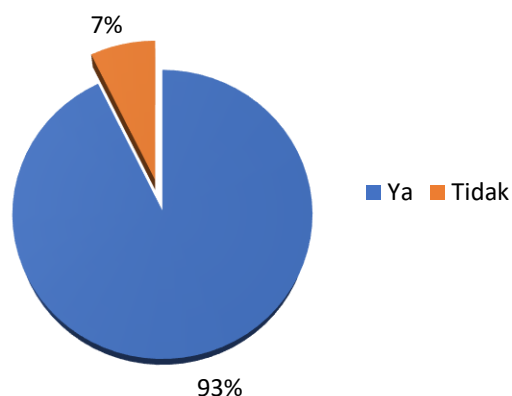
2. Asesmen Nasional.

Rangkaian kegiatan terkait dengan Asesmen Nasional yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- a) Pendampingan Pemuktahiran dan Konfirmasi Kesiapan Data Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) satuan pendidikan;
- b) *Workshop* Penetapan Satuan pendidikan dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021;
- c) Pendampingan Verifikasi dan Validasi Kesiapan TIK Asesmen Nasional;
- d) Monitoring dan Evaluasi Gladi Bersih Asesmen Nasional Jenjang SD;
- e) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional Jenjang SD;
- f) Evaluasi Pelaksanaan Asesmen Nasional.

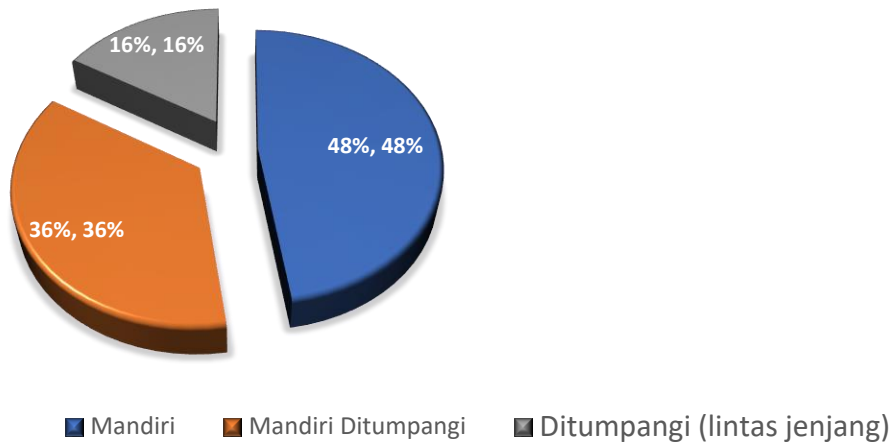
Beberapa data yang diperoleh dari kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional sebagai berikut :

1. Sebanyak 93% Dinas Pendidikan telah menetapkan satuan pendidikan pelaksana Asesmen Nasional dan satuan pendidikan yang menumpang ke satuan pendidikan lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan jarak dan lokasi satuan pendidikan, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan.



Grafik 3.7. Persentase Dinas Pendidikan Yang Menerbitkan Surat Keputusan Satuan Pendidikan Pelaksana Asesmen Nasional

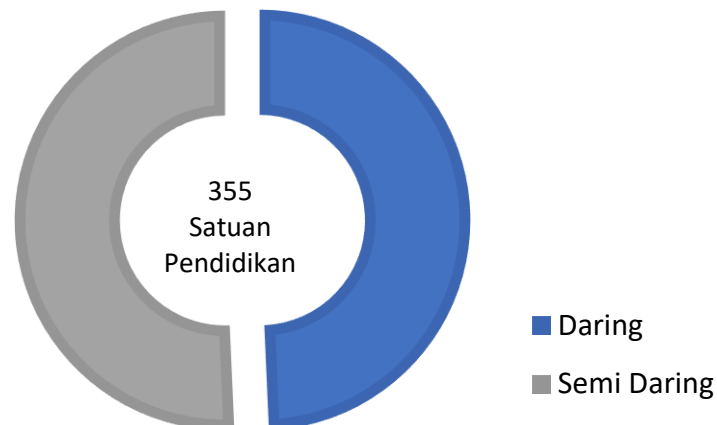
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Asesmen Nasional pada 355 satuan pendidikan yang menjadi sampel dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan status Asesmen Nasional mandiri 48%, mandiri ditumpangi 36% dan ditumpangi (lintas jenjang) 16% seperti terlihat pada grafik berikut.



Sumber: Olah data primer (2021)

Grafik 3.8. Status Asesmen Nasional Satuan Pendidikan Pelaksana

3. Secara umum, jumlah satuan pendidikan yang menjadi pelaksana Asesmen Nasional secara daring lebih sedikit dibandingkan semi daring dengan perbandingan 49 : 51.



Grafik 3.9. Moda Pelaksanaan Asesmen Nasional di Provinsi Sumatera Utara

4. Saat pelaksanaan Asesmen Nasional berlangsung beberapa kendala yang ditemui, antara lain:
- a. Pada *client* terjadi *blank white* pada moda pelaksanaan *online*, sementara moda pelaksanaan semi *online* terjadi *offline* merah;
 - b. token lama keluar dan *server* pusat *maintenance*;
 - c. ada beberapa daerah yang terjadi pemadaman listrik;
 - d. terjadi *miss* komunikasi antara penanggung jawab dengan pemegang akun;
 - e. *server* pusat *down*;
 - f. sering terjadi gangguan jaringan internet.



BAB

RVR

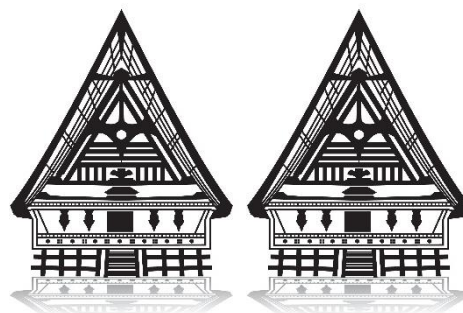


PENUTUP



BAB - IV

PENUTUP



Kesimpulan Umum Laporan Kinerja

Laporan Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara menyajikan pengukuran capaian kinerja dengan berbasis Indikator Kinerja Kegiatan yang tertera di Perjanjian Kinerja tahun 2021.

Dari lima indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, semua persentase capaiannya telah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 4.1. Persentase Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (<i>scorecard</i>) minimal 75	27,4%	38,06%	138,91%
[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5%	4,4%	113,64%
[IKK 1.3] Persentase kabupaten/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	95,2%	100%	105,04%
[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB	BB	-
[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82	94,66	115,44%

Dari segi pengelolaan anggaran, capaian kinerja LPMP Provinsi Sumatera Utara adalah :

1. Realisasi anggaran sebesar 99,29% atau sebesar Rp 29.302.366.289 ,- dari pagu total Rp 29.510.748.000,-. Hal ini memperlihatkan koordinasi yang baik antar seluruh unsur dalam organisasi untuk mengoptimalkan capaian daya serap anggaran;
2. Nilai Kinerja Anggaran tahun 2021 sebesar 94,66 memperlihatkan pelaksanaan pengelolaan anggaran masuk kategori penilaian “SANGAT BAIK”.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan antara lain:

1. Masih terdapat indikator kinerja belum didukung secara optimal dengan kegiatan yang mendukung pencapaian target yang ditetapkan.
2. Masih terbatasnya kemampuan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami teknik Literasi dan Numerasi sehingga diperlukan peran LPMP untuk melakukan pendampingan dan supervisi ke satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan Literasi dan Numerasi.
3. Masih terbatasnya SDM LPMP yang memahami Literasi, Numerasi dan Survei Karakter sehingga diperlukan peningkatan kompetensi berkelanjutan.
4. Belum optimalnya peran LPMP dalam kegiatan dapodik sehingga diperlukan regulasi yang mengatur hal tersebut.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Melakukan penguatan dan peningkatan kompetensi SDM LPMP Provinsi Sumatera Utara berdasarkan penugasan dan jabatannya.
2. Pemanfaatan hasil analisis informasi kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
3. Mengembangkan inovasi-inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.



LAMPIRAN





**Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Jumeri, S.TP., M.Si.



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 24.469.916.000
2	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 12.705.599.000
		TOTAL	Rp. 37.175.515.000

Jakarta, 29 Januari 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Jumeri, S.TP., M.Si.



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara
Dengan
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Jabatan : Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Jumeri, S.TP.,M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Medan, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Jumeri, S.TP., M.Si.



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2021
1	[SK 1] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	27.4
		[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	5
		[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbaru dan berkelanjutan	95.2
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	BB
		[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	82

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6397	Layanan Penjaminan Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas	Rp. 6.532.207.000
2	2005	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Rp. 22.978.541.000
		TOTAL	Rp. 29.510.748.000

Medan, 29 November 2021

**Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah**

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Jumeri, S.TP., M.Si.



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
LPMP SUMATERA UTARA
Tahun 2021**

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.1] Persentase Satuan Pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75	%	27.4	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 27.4	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 38.06	TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I ini, kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK.1.1, telah ada yang berjalan yaitu : pendampingan kebijakan kemendikbud berupa pendampingan proses pendaftaran program sekolah penggerak. Kendala / Permasalahan : Masih menunggu petunjuk pelaksanaan jadwal kegiatan prioritas dari pusat. Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan IKK 1.1 yang ada dalam PK tahun 2021 TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II ini kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara yang mendukung ketercapaian IKK 1.1 adalah sebagai berikut : 1. Koordinasi pendampingan kebijakan kemendikbud Dilaksanakan 4 angkatan yaitu tanggal 30 Maret, 31 Maret, 1 April dan 5 April 2021. 2. Pendampingan kebijakan kemendikbud Dilaksanakan tanggal 6 April 2021. 3. Pelaksanaan kemitraan dan implementasi program kerja sama. Rangkaian kegiatan ini antara lain : pendampingan

						implementasi pedoman mitigasi risiko dan PHBS 4. Bimbingan Teknis penyusunan peringkat dan pleno penetapan peringkat sekolah penggerak. LPMP Mendampingi 6 kabupaten/kota yaitu Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batubara dan Karo serta mendampingi Dinas Provinsi Sumatera Utara. LPMP membantu dalam hal pengisian Borang dan peringkat program sekolah penggerak. Kendala / Permasalahan : Kegiatan yg tertunda karena adanya pandemi Covid-19 dan kebijakan PPKM berbasis mikro antara lain : 1. Kegiatan pendampingan implementasi pedoman mitigasi risiko, PHBS, literasi dan numerasi. 2. Pemetaan kemampuan sarana telekomunikasi per-wilayah 3. Analisis kebutuhan penguatan sarana perwilayah dan potensi lokal. 4. Advokasi implementasi program penguatan sarana PJJ. 5. Pelaksanaan kemitraan dan implementasi program kerja sama. Strategi / Tindak Lanjut : Kegiatan kegiatan yang tertunda tersebut akan dilakukan penjadwalan kembali menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terkait kondisi pandemi Covid-19. Alternatif lain yaitu merubah metode kegiatan yang semula Luring menjadi Daring. TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan III ini, kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara yang mendukung ketercapaian IKK 1.1 adalah sebagai berikut : 1. Sub komponen 063.e. Pelaksanaan kemitraan dan implementasi program kerja sama yaitu kegiatan pendampingan mitigasi risiko, PHBS, Literasi dan Numerasi. 2. Sub komponen 061.B. Pendampingan perencanaan program sekolah penggerak angkatan II. Pada kegiatan ini LPMP Provinsi Sumatera Utara melaksanakan coaching clinic di 10 kab/kota untuk mendampingi para kepala sekolah dalam pendaftaran program sekolah penggerak. 3. Sub komponen 062.c. Verifikasi data implementasi program sekolah penggerak angkatan I. Pada kegiatan ini LPMP Provinsi Sumatera Utara menjaring data terkait implementasi sekolah penggerak dan permasalahannya di 6 kab/kota. 4. Sub komponen 063.J. Pendampingan sekolah penggerak angkatan I . Kendala / Permasalahan : 1. Sepanjang bulan Agustus kegiatan belum dapat dilaksanakan karena berlakunya kebijakan PPKM level 4. 2. Terdapat program prioritas seperti program sekolah penggerak dan ANBK, yang mempunyai rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, namun belum mencukupi anggarannya. Strategi / Tindak Lanjut :
--	--	--	--	--	--	---

						1. Melakukan perencanaan dan persiapan yang matang agar kegiatan segera terlaksana saat kebijakan PPKM telah diturunkan levelnya. 2. Untuk mendukung kebijakan pelaksanaan program prioritas seperti Program Sekolah Penggerak dan Asesmen Nasional, LPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan revisi anggaran dimana pada Rincian Output 6397.QDB komponen 051, 052, 053, 054, 055, 071, 072, 074, 075 dan 081 dihilangkan dan anggarannya dialihkan untuk mendukung program prioritas yaitu program sekolah penggerak dan ANBK. TW4 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan IV ini kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara yang mendukung ketercapaian IKK 1.1 adalah : 1) Rangkaian kegiatan yang terkait pembelajaran di masa pandemi seperti pembelajaran jarak jauh dan kesiapan sekolah menjalankan PTM. 2) Rangkaian kegiatan yang terkait dengan program sekolah penggerak antara lain : a) Pendampingan Perencanaan Program Sekolah Penggerak b) Verifikasi Data Implementasi Program Sekolah Penggerak Angkatan I c) Bimbingan Teknis Penyusunan Peringkat dan Pleno Penetapan Peringkat Sekolah Penggerak d) Pleno Kelulusan Program Sekolah Penggerak e) Forum Pemangku Kepentingan Daerah f) Monitoring Keterlaksanaan Program Sekolah Penggerak Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut : 1) Sebanyak 33 kabupaten/kota di Sumatera utara mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan - kebijakan kemendikbud khususnya kebijakan terkait pembelajaran di masa pandemi. 2) Terdapat sebanyak 488 satuan pendidikan di 16 kabupaten/kota yang berhasil lulus menjadi sekolah penggerak. Kendala / Permasalahan : 1. Belum ada petunjuk teknis terkait pengukuran kinerja sekolah, sehingga menyulitkan bagi LPMP dalam mengukur ketercapaian IKK. 1.1. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Belum ada ada petunjuk teknis terkait pengukuran kinerja sekolah, sehingga digunakan metode pendekatan nilai rapor mutu sekolah dari aplikasi PMP tahun 2020. 2. Ditetapkan ambang batas nilai rata-rata SD, SMP, SMA dan SLB sebesar 6,00.
--	--	--	--	--	--	--

2	[SK 1.0] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.2] Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk	%	5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 5	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 4.16	TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I ini kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK 1.2 belum berjalan. Kegiatan masih berfokus pada program sekolah penggerak. Kendala / Permasalahan : Belum dapat dilakukan pengukuran kesenjangan AKM dan survey karakter karena masih menunggu petunjuk teknis dari kementerian. Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan IKK 1.2 yang ada dalam PK tahun 2021 TW2 : Progress / Kegiatan : Pada Triwulan II, Kegiatan yang telah dilakukan LPMP Provinsi Sumatera Utara terkait dengan IKK 1.2 adalah sebagai berikut : 1. Pendampingan pemutakhiran (update) dan konfirmasi kesiapan data TIK sekolah Asesmen Nasional tahun 2021. 2. Workshop penetapan sekolah dalam pelaksanaan asesmen Nasional Tahun 2021. Kendala / Permasalahan : 1. Terdapat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang kurang proaktif dalam penyelesaian data TIK sekolah. 2. Terdapat sekolah sekolah yang lokasinya sulit dijangkau masih bermasalah data TIK sekolahnya. Strategi / Tindak Lanjut : 1. Telah dibentuk Satgas Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) dimana di dalam Strgas ini terdapat koordinator wilayah yang bertugas mengkoordinasikan penyelesaian masalah data TIK sekolah ke dinas kabupaten/kota yang berada di wilayah kewenangannya. 2. Untuk memudahkan dan mempercepat koordinasi, dibuat Whatsapp Group (WAG) satgas ANBK LPMP Provinsi Sumatera Utara. TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan III ini kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian IKK 1.2 adalah sebagai berikut : Komponen 084. Verifikasi dan validasi data mutu pendidikan. Pada kegiatan ini LPMP Provinsi Sumatera Utara melakukan verifikasi dan validasi data TIK sekolah dalam kaitannya dengan persiapan pelaksanaan ANBK. Kendala / Permasalahan : Tidak ada permasalahan yang signifikan dan LPMP Provinsi Sumatera Utara terus memonitor kesiapan pelaksanaan ANBK melalui Satgas ANBK. Strategi / Tindak Lanjut :
---	---	--	---	---	--	---	---

							Strategi yang dilakukan sebagai berikut 1. Membentuk Satgas ANBK 2. Menunjuk koordinator wilayah, sehingga setiap ada permasalahan, cepat diatasi. TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian target IKK 1.2 adalah sebagai berikut : 1) Rangkaian kegiatan yang terkait persiapan sampai dengan pelaksanaan asesmen nasional antara lain : a) Pendampingan Pemuktahiran dan Konfirmasi Kesiapan Data TIK Sekolah b) Workshop Penetapan Sekolah dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 c) Pendampingan Verifikasi dan Validasi Kesiapan TIK ANBK d) Monev Gladi Bersih ANBK Jenjang SD e) Monev Pelaksanaan ANBK Jenjang SD f) Evaluasi Pelaksanaan ANBK 2) LPMP Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan supervisi penjaminan mutu pendidikan program kampus mengajar di 33 kabupaten/kota. Hasil yang dicapai adalah sebagai berikut : 1) Suksesnya penyelenggaraan asesmen nasional di provinsi Sumatera Utara yang merupakan penyelenggaraan yang pertama secara nasional . 2) Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan terkait pelaksanaan asesmen untuk menjadi bahan perbaikan di pelaksanaan selanjutnya. 3) Teridentifikasinya permasalahan-permasalahan pada program kampus mengajar. Kendala / Permasalahan : Tahun 2021 adalah kali pertama diadakan asesmen nasional dan apapun hasilnya bukanlah merupakan gambaran peran LPMP karena belum ada intervensi langsung LPMP terkait kompetensi literasi, numerasi dan karakter. Strategi / Tindak Lanjut : Untuk selanjutnya LPMP akan lebih berperan dalam usaha peningkatan kompetensi literasi, numerasi dan karakter.
--	--	--	--	--	--	--	--

3	[SK 1.0] Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan	%	95.2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 95.2	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 100	TW1 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan I ini, kegiatan yang mendukung ketercapaian IKK 1.3 belum berjalan. Masih berfokus pada kegiatan program sekolah penggerak. Kendala / Permasalahan : Masih menunggu petunjuk pelaksanaan jadwal kegiatan prioritas dari pusat. Strategi / Tindak Lanjut : Menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan IKK 1.3 yang ada dalam PK tahun 2021. TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II Kegiatan yang telah dilakukan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang terkait dengan IKK 1.3 adalah sebagai berikut : Verval NUPTK , Penyusunan bahan verifikasi dan validasi data DAPODIK. Kendala / Permasalahan : Kendala/permasalahan PMP Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang terkait dengan IKK 1.3 adalah sebagai berikut : Bahan verifikasi dan validasi Aplikasi Dapodik belum final. sasaran sekolah yang dilakukan verval cukup banyak mencapai 14.300 sekolah, sedangkan SDM dan waktu yang dimiliki sangat terbatas. Pemenuhan indikator raport Dapodik harus dikaji lebih mendalam karena solusinya memerlukan masukan dari berbagai pihak. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi/tindak lanjut PMP Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan yang terkait dengan IKK 1.3 adalah sebagai berikut : Berkoordinasi dengan eselon I dalam hal peran LPMP dan Dinas kabupaten/kota di dalam penanganan Dapodik. TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan III ini, kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian IKK. 1.3 adalah sebagai berikut : Dalam kegiatan Work Shop Penetapan Sekolah dalam Pelaksanaan Asesmen Nasional 2021 LPMP Provinsi Sumatera Utara mengundang Operator Dinas Pendidikan Provinsi dan Operator Kabupaten/Kota. Pada kesempatan itu disampaikan juga materi Dapodik terkait dengan data yang akurat dan terbarukan. Kendala / Permasalahan :
---	---	--	---	------	---	--	---

							Permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : Masih kurangnya kegiatan yang mendukung dalam usaha meningkatkan koordinasi antara LPMP Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Kab/kota dan Dinas Provinsi dalam hal Dapodik yang akurat dan terbaru. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : Menyampaikan materi terkait Dapodik yang akurat dan terbaru pada setiap kegiatan LPMP dengan Dinas Kab/kota dan Dinas Provinsi. TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian target IKK 1.3 adalah dengan berkoordinasi langsung ke Dinas Pendidikan kabupaten kota dan Dinas Pendidikan Provinsi terkait pemutakhiran Dapodik. Kendala / Permasalahan : Belum ada petunjuk pelaksanaan terkait peran LPMP dalam hal pemutakhiran Dapodik. Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi langsung ke Dinas Kabupaten/kota.
--	--	--	--	--	--	--	---

4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.1] Predikat SAKIP	predikat	BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : TW4 : BB	TW1 : - TW2 : - TW3 : TW4 : BB	TW1 : Progress / Kegiatan : Dokumen pendukung implementasi SAKIP telah disusun, seperti PK, Rencana Aksi dan instrumen pengukuran kinerja. Kendala / Permasalahan : Belum terciptanya budaya untuk disiplin dalam membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notula rapat kantor . Strategi / Tindak Lanjut : Membuat SOP pengarsipan dokumentasi dan notula rapat. TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II, Kegiatan yang telah dilakukan LPMP Provinsi Sumatera Utara yang terkait dengan IKK 2.1 adalah sebagai berikut : Pada awal triwulan II, yaitu di bulan April 2021 Pimpinan dan tim Sakip melakukan evaluasi atas hasil pengukuran kinerja triwulan I yang kemudian diinputkan pada aplikasi SPASIKITA. Untuk tahun 2021 ini LPMP Provinsi Sumatera Utara termasuk dalam satker yang diajukan untuk mengikuti penilaian sebagai satker dengan predikat ZI-WBK. Terkait dengan hal tersebut Tim Sakip LPMP Provinsi Sumatera berperan dalam usaha mendapatkan nilai yang baik pada area penguatan akuntabilitas. Pada triwulan II ini , 2 orang tim SAKIP LPMP Provinsi Sumatera Utara ikut serta dalam pelatihan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan moda daring yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei s.d 3 Juni 2021 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendikbud. Kendala / Permasalahan : Belum dilakukan reviu dokumen perencanaan seperti Renstra, RKT terkait dengan adanya refocussing anggaran. Strategi / Tindak Lanjut : Segera dibuat penjadwalan kegiatan review dokumen perencanaan terkait implementasi SAKIP. TW3 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan III ini kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian IKK. 2.1 adalah sebagai berikut : 1. Pada minggu pertama bulan Juli dilakukan evaluasi atas hasil pengukuran kinerja di triwulan II. 2. LPMP Provinsi Sumatera Utara termasuk Satker yang diajukan untuk mengikuti penilaian sebagai Satker dengan predikat ZI-WBK. Terkait dengan hal tersebut, LPMP Provinsi Sumatera Utara terus berbenah,
---	--	-----------------------------	----------	----	--	--	---

						diantaranya dengan melakukan sosialisasi ZI-WBK pada setiap Apel Daring yang dilaksanakan setiap Senin pagi. Kendala / Permasalahan : Permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 1. Masih terdapat keterlambatan di dalam mengisi form pengukuran kinerja. 2. Format Kerangka Acuan Kerja belum seragam. Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan terkait pentingnya pengisian form pengukuran kinerja , sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja. 2. Membuat format Kerangka Acuan Kerja agar tercapai keseragaman di dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja pada setiap kegiatan. TW4 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan IV ini kegiatan yang telah dilaksanakan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam mendukung ketercapaian IKK 2.1 antara lain : Melaksanakan implementasi SAKIP dimulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan pengelolaan data kinerja,. Kendala / Permasalahan : Masih ada pengelola kegiatan yang terlambat menyerahkan laporan kegiatan sehingga dapat menghambat penginputan data pengukuran kinerja. Strategi / Tindak Lanjut : Terus menerus melakukan sosialisasi implementasi SAKIP.
--	--	--	--	--	--	--

4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola LPMP	[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	nilai	82	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 82	TW1 : 0 TW2 : 0 TW3 : 0 TW4 : 94.66	TW1 : Progress / Kegiatan : NKA pelaksanaan RKAKL dilihat dari nilai EKA (60%)+nilai IKPA (40%). Nilai IKPA pada triwulan I adalah 94,68 sedang nilai EKA belum dapat dilihat. Kendala / Permasalahan : Nilai EKA belum dapat dilihat karena belum dapat diinputkan capaian RO pada aplikasi SMART/SIMPROKA. Strategi / Tindak Lanjut : Berkoordinasi dengan unit eselon I untuk melaksanakan koordinasi dengan tim SIMPROKA dan SMART untuk segera merealisasikan aplikasi tersebut untuk penginputan capaian RO. TW2 : Progress / Kegiatan : Pada triwulan II ini, upaya yang telah dilakukan LPMP Provinsi Sumatera Utara dalam kaitannya dengan IKK 2.1 adalah sebagai berikut : Menyesuaikan anggaran dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui revisi anggaran dengan konsultasi dan koordinasi dengan eselon I dan kanwil DJPB. Merencanakan realisasi belanja modal selanjutnya, penjadwalan ulang kegiatan-kegiatan yang tertunda dan melaksanakan layanan perkantoran, sarana internal dan dukungan manajemen. Kendala / Permasalahan : Nilai IKPA LPMP Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Strategi / Tindak Lanjut : Konsolidasi tim perbendaharaan LPMP Provinsi Sumatera Utara, untuk kembali meningkatkan nilai IKPA. TW3 : Progress / Kegiatan : Target Nilai Kinerja Anggaran yang ada di Perjanjian Kinerja adalah 82. Nilai Kinerja Anggaran ditentukan dari Nilai EKA (60%) dan Nilai IKPA (40%). Pada triwulan III ini nilai IKPA LPMP Provinsi Sumatera Utara mengalami tren peningkatan, dimana nilai tersebut adalah sebagai berikut : 1. Nilai IKPA di bulan Juli = 89,52 2. Nilai IKPA di bulan Agustus = 90,65 3. Nilai IKPA di bulan September = 91,56 Kendala / Permasalahan : Permasalahan yang ada adalah sebagai berikut : 1. pada bulan Juli, indikator yang nilainya berada di bawah 82 adalah "Penyelesaian Tagihan" dan Kesalahan SPM". 2. Pada bulan Agustus, indikator yang nilainya di bawah 82 adalah " Penyelesaian Tagihan" dan "Kesalahan SPM". 3. Pada bulan September, indikator yang nilainya berada dibawah 82 adalah " Penyelesaian Tagihan" dan " Kesalahan SPM".
---	--	--	-------	----	---	--	---

						Strategi / Tindak Lanjut : Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Evaluasi atas pelaksanaan penyelesaian tagihan dimana diupayakan tidak ada terjadi keterlambatan dan penyelesaian sesuai jadwal yang telah ditentukan. 2. Evaluasi atas proses pembuatan SPM dimana diupayakan verifikasi yang lebih mendalam atas pembuatan SPM sehingga tidak terjadi kesalahan SPM. TW4 : Progress / Kegiatan : Target Nilai Kinerja Anggaran yang ada di Perjanjian Kinerja adalah 82. Nilai Kinerja Anggaran ditentukan dari Nilai EKA (60%) dan Nilai IKPA (40%). Pada triwulan IV ini nilai IKPA LPMP Provinsi Sumatera Utara mengalami tren peningkatan, dimana nilai tersebut adalah sebagai berikut : 1. Nilai IKPA di bulan Oktober = 88,78 2. Nilai IKPA di bulan November = 90,39 3. Nilai IKPA di bulan Desember = 92,71 Kendala / Permasalahan : Beberapa faktor yang menentukan nilai IKPA sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM pengelola perbendaharaan dan sangat diperlukan proses cek dan recek. Strategi / Tindak Lanjut : Melakukan proses cek dan recek dalam pengelolaan anggaran.
--	--	--	--	--	--	--

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan mutunya	14311	Lembaga	0	0	8500	14311	Rp. 6.532.207.000
2	[061] Sosialisasi Fasilitas Berdasarkan SNP			0	0	4	4	Rp. 412.760.000
3	[062] Bimbingan Teknis Fasilitas Berdasarkan SNP			0	0	6	8	Rp. 170.826.000
4	[063] Pendampingan Fasilitas Berdasarkan SNP			0	0	3	4	Rp. 1.972.939.000
5	[064] Diseminasi Hasil Fasilitas Berdasarkan SNP			0	0	0	4	Rp. 469.162.000
6	[065] Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Berdasarkan SNP			0	0	0	6	Rp. 219.748.000
7	[073] Supervisi Satuan Pendidikan			0	0	0	5	Rp. 528.910.000
8	[082] Bimbingan Teknis Verifikasi Data Mutu Pendidikan			0	0	0	4	Rp. 429.873.000
9	[083] Pelaksanaan Pengumpulan Data Mutu Pendidikan			0	0	8500	14311	Rp. 859.746.000

10	[084] Verifikasi dan Validasi Data Mutu Pendidikan			0	1	3	4	Rp. 1.468.243.000
11	Gaji dan Tunjangan	1	Layanan	0	0	0.72	1	Rp. 11.962.757.000
12	[001] Gaji dan Tunjangan			3	10	12	12	Rp. 11.962.757.000
13	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Layanan	0	0	0.72	2	Rp. 9.727.912.000
14	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 9.727.912.000
15	Dukungan Manajemen Satker	1	Layanan	0	0	0.72	1	Rp. 939.300.000
16	[051] Pengelolaan Kepegawaian			1	4	7	10	Rp. 97.900.000
17	[052] Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan			1	4	7	10	Rp. 103.300.000
18	[054] Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan			2	5	8	10	Rp. 264.400.000
19	[055] Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan			1	4	7	10	Rp. 277.900.000

20	[056] Perencanaan Program dan Anggaran			1	4	7	10	Rp. 97.900.000
21	[058] Pengelolaan Data dan Informasi			1	4	7	10	Rp. 97.900.000
22	Layanan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	23	unit	0	6	18	23	Rp. 348.572.000
23	[997] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran			0	6	18	23	Rp. 348.572.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 29.510.748.000

Medan, 19 Januari 2022

Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara



Afrizal Sihotang, S.T., M.Si

SUSUNAN TIM KERJA SAKIP 2021
LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA



Pengarah SAKIP, Afrizal Sihotang, S.T., M.Si.

Penanggung jawab: Ajizah Siregar, S.Pd., M.Pd.

Ketua: Okta Kurniawan Abdillah, S.Si.

Sekretaris: Rahmi Yunita, S.E., M.Si.

Anggota: Drs. Syahdian, M.Si., Dra.Sri Wandayani Harahap, M.Pd.,

Dedy Iskandar, S.T., Bastian Derajat Pulungan, S.T., M.Si.,

Agus Muhardi Amin, S.E., M.Si., Jogi Sumarlan Siregar, S.T., M.Si.

Rubiyanti Dalimunthe, S.Si., M.Pd., Reinhard Rasoki Togi Gultom, S.T.

Yulidar, S.Si., M.Si., Tuahta Oktavianus Ginting, S.Sos.

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LPMP PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2021 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen LPMP Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 28 Januari 2022
KETUA TIM PEREVIU

Alizah Siregar, M.Pd
NIP 196910101991032003

